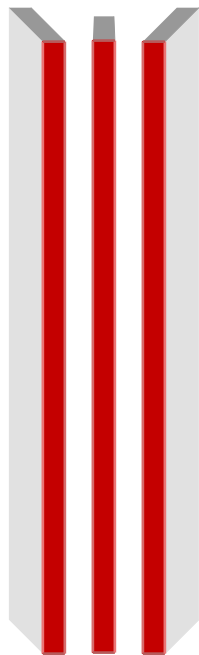




MONOGRAFI KELURAHAN TENGAH TAHUN 2020 – 2021



**KELURAHAN TENGAH
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
ALAMAT : JALAN TENGAH NOMOR 28 KOTA SINGKAWANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjat kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala berkat dan nikmat-Nyalah kita dalam setiap langkah hidup dan aktivitas kita selalu menjadi penyemangat. Semangat juang untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas diri pribadi demi mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara kita. Maka akhirnya kami selaku aparat Kelurahan Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Profil Kelurahan Tengah Tahun 2021 ini.

Dasar penyusunan dan penulisan Profil Kelurahan tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara yang ditindaklanjuti melalui beberapa Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah dan Kelurahan. Dan Profil Kelurahan merupakan amanat yang secara jelas dimandatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Profil Kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kelurahan. Profil Kelurahan terdiri atas data dasar keluarga, potensi kelurahan, dan tingkat perkembangan kelurahan.

Dalam pelaksanaan penyusunan Profil Kelurahan dilakukan dalam beberapa rangkaian kegiatan antara lain :

1. Penyiapan instrumen pengumpulan data;
2. Penyiapan kelompok kerja profil kelurahan;
3. Pelaksanaan pengumpulan data;
4. Pengolahan data; dan
5. Publikasi data profil kelurahan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Profil Kelurahan ini bermaksud agar data-data yang ada di wilayah Kelurahan Tengah dapat tersusun lebih baik, valid dan mudah dimengerti dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak dalam upaya mendapatkan informasi mengenai data Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Profil Kelurahan ini masih banyak kekurangan baik kelengkapan maupun akurasi serta ketepatan waktu maupun penyajiannya. Untuk itu guna kesempurnaan penyusunan profil ini dimasa datang kami harapkan kritik dan saran dari pembaca guna kemajuan wilayah bagian barat Kota Singkawang khususnya Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat.

Demikian atas bantuan berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan profil ini kami ucapkan terimakasih.



Singkawang, Agustus 2022

LURAH

IWAN KURNIAWAN,S.IP

Penata Tk.I

NIP. 19670308 199203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan serta berjenjang dengan tujuan meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan hendaknya dilaksanakan terarah, terpadu dan berkesinambungan agar terjalin hubungan yang sinergis antara pelaksanaan pembangunan pada level Pemerintahan secara berjenjang dari pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Pemerintahan Kelurahan dan di sisi lain juga merupakan kewajiban segenap lapisan masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga hasil yang dicapai bersentuhan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat yang menjadi obyek pembangunan.

Sehubungan hal tersebut maka diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan dan swadaya gotong royong ditingkat kelurahan guna mencapai hasil guna dan daya guna dari hasil pembangunan dimaksud serta dinikmati langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran hasil pembangunan.

Untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah secara berjenjang menyelenggarakan perlombaan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan terkoordinasi, terarah terpadu dan berkelanjutan sehingga berdampak adanya persaingan positif antara Desa/Kelurahan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai, sejahtera, dan berkecukupan disemua bidang.

1.2. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Profil Kelurahan Tengah Tahun 2021 ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 5) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- 6) Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Singkawang kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Singkawang;
- 7) Keputusan Walikota Singkawang Nomor 170 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang;

.BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN DESA TENGAH MENJADI KELURAHAN

Kampung Tengah adalah salah satu daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Sambas. Nama **“TENGAH”** diambil dari kondisi wilayah yang terletak di tengah Kota Singkawang.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan maka sebutan Desa menjadi Kelurahan, maka Desa Tengah menjadi Kelurahan Tengah dan dipimpin oleh **Ibu ALIZAH** yang menjabat sebagai Lurah Tengah. Jabatan Kepala Desa dahulu diganti dengan sebutan Lurah hingga sekarang. Ditahun 2005 sampai 2007 Kelurahan Tengah dipimpin oleh Lurah Bapak **ASKAN**. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Singkawang akan adanya rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang maka pada tahun 2008-2009 Kelurahan Tengah dipimpin oleh Bapak **SUNARDI**.

Dalam rangka mengoptimalkan jajaran Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2010 Kelurahan Tengah dipimpin oleh Bapak **ISMAIL** sampai Tahun 2012. Selanjutnya rotasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang Kelurahan Tengah dipimpin Ibu **ARIYANI** pada tahun 2012-2013. Dalam penyegaran jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2013 sampai 2014 Kelurahan Tengah dipimpin oleh Ibu **MANARILAH, SH**, kemudian pada tahun 2014 s/d 2017 dipimpin oleh Lurah Bapak **ALIMIN, S. Pd**. Pada Maret 2019 s/d Februari 2020 di pimpin oleh Bapak **YULIUS IMAMMORA,SH**. Pada Februari 2020 s/d 2021 di Pimpin Oleh Lurah Bapak **PRAYETNO**.

Pergeseran Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang, maka pada bulan Juli 2021 Kelurahan Tengah dipimpin oleh Lurah Bapak **IWAN KURNIAWAN S.IP** maka sejak terbitnya SK Walikota pada Juli 2021 Kelurahan Tengah dipimpin oleh Bapak **IWAN KURNIAWAN S.IP** Sampai Sekarang.

**NAMA-NAMA LURAH
DI DESA TENGAH DAN KELURAHAN TENGAH
TAHUN 2002 s.d SEKARANG**

NO	NAMA	MASA BERKERJA		PEMERINTAH KAB/KOTA
		MULAI	BERAKHIR	
1	2	3	4	5
1	ALIZAH	2002	2004	KOTA SINGKAWANG
2	ASKAN	2005	2007	KOTA SINGKAWANG
3	SUNARDI	2008	2009	KOTA SINGKAWANG
4	ISMAIL	2010	2012	KOTA SINGKAWANG
5	ARIYANI	2012	2013	KOTA SINGKAWANG
6	MANARILAH, SH	2013	2014	KOTA SINGKAWANG
7	ALIMIN, S.Pd	2015	2017	KOTA SINGKAWANG
8	MUHADI TRISNO	2017	2019	KOTA SINGKAWANG
9	YULIUS IMAMMORA, SH	2019	2020	KOTA SINGKAWANG
10	PRAYETNO	2020	2021	KOTA SINGKAWANG
11	IWAN KURNIAWAN,S.IP	2021	Sekarang	KOTA SINGKAWANG

Demikian sejarah singkat perkembangan Kelurahan Tengah dengan berbagai perubahan pimpinan dan keadaan serta kondisi masyarakat Tengah yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Adapun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan sejarah singkat Kelurahan Tengah, baik penulisan dan penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terimakasih.

2.2. KONDISI WILAYAH KELURAHAN TENGAH

Kelurahan Tengah merupakan salah satu dari 4 (empat) Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Singkawang Barat, yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Sungai Singkawang
Sebelah Timur	:	Sungai Singkawang
Sebelah Selatan	:	Kelurahan Melayu
Sebelah Barat	:	Kelurahan Melayu

Wilayah Kelurahan Tengah yang memiliki luas wilayah \pm 18 Ha terdiri atas Pemukiman Penduduk, pertokoan, pertambakan, Usaha Kecil Menengah, dan rumah tangga yang secara berkelanjutan dikelola oleh masyarakat Kelurahan Tengah.

Kelurahan Tengah yang dilalui beberapa sungai (parit) besar memberikan keuntungan dalam drainase (pengairan) ke beberapa wilayah untuk kepentingan perikanan dan usaha masyarakat lainnya.

2.3. KONDISI PENDUDUK KELURAHAN TENGAH

Kelurahan Tengah merupakan kelurahan di Kecamatan Singkawang Barat yang memiliki jumlah penduduk. Tingkat kepadatan penduduk yang terendah di wilayah Kecamatan Singkawang Barat tersebut memiliki jumlah penduduk hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.929 jiwa.

Penduduk yang terbagi atas laki-laki sebanyak 466 KK dan perempuan sebanyak 153 KK. Adapun jumlah KK di Kelurahan Tengah yakni 619 KK. Penduduk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, pekerjaan dan budaya yang beragam tersebar di wilayah Kelurahan Tengah.

2.4. POTENSI KELURAHAN TENGAH

Wilayah Kelurahan Tengah yang memiliki luas wilayah \pm 18 Ha memiliki banyak potensi dalam pengembangan taraf hidup masyarakat. Wilayah Tengah yang terletak di perkotaan Kota Singkawang terdiri dari Pemukiman Penduduk, Pertokoan, Perkantoran, Taman Kota, Perdagangan serta tempat peribadatan merupakan sarana dan fasilitas masyarakat Tengah dalam kehidupan sehari-hari.

Potensi yang ada di wilayah Kelurahan Tengah sangat banyak dan dapat dikelola oleh masyarakat untuk menjadi mata pencaharian mereka. Untuk itu diperlukannya suatu bentuk perhatian dari pihak pemerintah dalam menyikapi hal tersebut demi suksesnya program pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Khususnya dalam hal ini kinerja Pemerintah Kota Singkawang sebagai wahana dalam dunia otonomi daerah dalam mengelola dan mengembangkan daerah otonom.

Salah satu upaya pemerintah tersebut yakni dengan adanya agenda tahunan yakni Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi wahana masyarakat dalam upaya penyampaian aspirasi serta usulan program pembangunan wilayah tiap-tiap kelurahan demi suksesnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Singkawang.

BAB III

DATA DASAR KELUARGA

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Profil Kelurahan terdiri atas data dasar keluarga, potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan. Data dasar keluarga berisikan gambar menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga meliputi :

3.1 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang berpengaruh besar dalam upaya mensukseskan program pembangunan di suatu wilayah. Adanya sumber daya manusia yang baik dengan pola pengembangan yang baik, maka proses pembangunan suatu wilayah akan berjalan dengan baik seiring peningkatan pada aspek kehidupan lainnya.

3.2 PERKEMBANGAN KESEHATAN

Kesehatan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan sebab dengan hidup sehat semua orang dapat menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Dalam pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pihak pemerintah diantaranya dengan menyediakan Rumah Sakit, Puskesmas, Pos Pelayanan Terpadu (**POSYANDU**) dan lain-lain.

Sumber daya kesehatan merupakan unsur terpenting didalam peningkatan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, sumber daya kesehatan terdiri dari tenaga, sarana dan dana yang tersedia untuk pembangunan kesehatan. Dengan adanya pembangunan kesehatan yang baik, maka perkembangan kesehatan masyarakat juga seiring meningkat.

Pemerintah Kota Singkawang sebagai aparaturnya pemerintah otonomi daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam mengambil langkah dalam peningkatan perkembangan kesehatan masyarakat Kota Singkawang dalam mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik.

TABEL 3.1
DATA PERKEMBANGAN KESEHATAN
KELURAHAN TENGAH

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Kematian bayi	1. jumlah bayi lahir	42 orang	35 orang
		2. jumlah bayi mati	0 orang	0 orang
2.	Gizi dan Kematian Balita	1. Jumlah balita	0 orang	0 orang
		2. Jumlah balita gizi buruk	0 orang	0 orang
		3. Jumlah balita gizi baik	0 orang	0 orang
		4. Jumlah balita mati	0 orang	0 orang
3.	Cakupan Imunisasi	1. Cakupan imunisasi polio	55 orang	58 orang
		2. Cakupan imunisasi DPT-1	46 orang	49 orang
		3. Cakupan imunisasi BCG	50 orang	52 orang
4.	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup		
5.	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Hidup	1. Total rumah tangga dapat akses air bersih	619 KK	619 KK
		2. Pengguna air sumur pompa	RT	0 RT
		3. Pengguna sumur gali	RT	0 RT
		4. Pengguna mata air	RT	0 RT
		5. Pengguna hidran umum	RT	0 RT
		6. Pengguna penam pung air hujan	205 KK	205 KK
		7. Pengguna embun	RT	0 RT
		8. Pengguna perpipaan	414 KK	414 KK
		9. lainnya	RT	0 RT
		10. Total rumah tangga tidak mendapat air bersih	RT	0 RT
6.	Kepemilikan Jamban	1. Total rumah tangga mempunyai jamban/ WC	347 KK	347 KK

		2. Total rumah tangga yg tidak mempunyai jamban/WC	12 KK	12 KK
		3. Pengguna MCK	RT	RT

3.3 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular-materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi: *Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus.*

Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia salih yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi.

Secara kelembagaan, sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama; sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) dilakukan oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama.

Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekadar sebagai salah satu aspek yang perannya sangat minimal, bukan menjadi landasan dari seluruh aspek.

Hal ini juga tampak pada BAB X pasal 37 UU Sisdiknas tentang ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mewajibkan memuat 10 bidang mata pelajaran dengan pendidikan agama yang tidak proposional dan tidak dijadikan landasan bagi bidang pelajaran yang lainnya. Ini jelas tidak akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kacaunya kurikulum ini tentu saja berawal dari asasnya yang sekular, yang kemudian mempengaruhi penyusunan struktur kurikulum yang tidak memberikan ruang semestinya bagi proses penguasaan *tsaqâfah* Islam dan pembentukan kepribadian Islam.

Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan *tsaqâfah* Islam. Berapa banyak lulusan pendidikan umum yang tetap saja 'buta agama' dan rapuh kepribadiannya? Sebaliknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai *tsaqâfah* Islam dan secara relatif sisi kepribadiannya tergarap baik. Akan tetapi, di sisi lain, ia buta terhadap perkembangan sains dan teknologi.

Akhirnya, sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan, dan jasa) diisi oleh orang-orang yang relatif awam terhadap agama karena orang-orang yang mengerti agama terkumpul di dunianya sendiri (madrasah, dosen/guru agama, Depag), tidak mampu terjun di sektor modern.

Sistem pendidikan yang material-sekularistik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekular. Dalam sistem sekular, aturan-aturan, pandangan, dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Karena itu, di tengah-tengah sistem sekularistik ini lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama.

TABEL 3.2
DATA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
KELURAHAN TENGAH

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas	1. Jumlah penduduk buta huruf	- orang	- orang
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat	197 orang	201 orang
		3. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	195 orang	213 orang
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	202 orang	212 orang
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	642 orang	651 orang
		6. Jumlah penduduk tamat D-1	- orang	- orang
		7. Jumlah Penduduk tamat D-2	4 orang	9 orang
		8. Jumlah penduduk tamat D-3	49 orang	55 orang
		9. Julah penduduk Tamat S1	132 orang	146 orang
		10. Julah penduduk Tamat S2	4 orang	6 orang
		11. Julah penduduk Tamat S3	0 orang	0 orang
2.	Wajib Belajar 9 tahun dan putus sekolah	1. Jumlah Penduduk tamat D-3	- orang	- orang
		2. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	- orang	- orang
		3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	- orang	- orang
3.	Prasarana Pendidikan	1. Jumlah SLTA/Sederajat	0 buah	0 buah

		2. Jumlah SLTP/Sederajat	1 buah	1 buah
		3. Jumlah SD/Sederajat	2 buah	2 buah
		4. Lembaga Pendidikan Agama	1 buah	1 buah
		5. Lembaga pendidikan lain (Kursus/sejenisnya)	1 buah	1 buah

3.4 PENGUASAAN ASET EKONOMI DAN SOSIAL KELUARGA

Pemerintah Indonesia semenjak berlakunya Otonomi Daerah telah mencanangkan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan daerah, pengentasan penduduk miskin dari kemiskinannya, pengembangan sumberdaya manusia desa, serta peningkatan dan penguatan kelembagaan usaha kecil dan koperasi di seluruh tanah air.

Saat ini kemandirian ekonomi nasional telah menjadi tuntutan riil. Ketergantungan pada keterdiktean oleh pihak luar-negeri digugat sebagai penyelewengan mendasar dari cita-cita kemerdekaan nasional, sekaligus memperpuruk martabat, *prestise* dan harga diri bangsa. Platform nasional tentang pinjaman luar-negeri yang harus bersifat “sementara” dan “pelengkap” tidak ditaati lagi.

Salah satu program khusus untuk mensukseskan gerakan nasional itu dituangkan dalam Program-program Penguatan kelembagaan dan manajemen KUBA untuk memaksimalkan manfaat dari potensi daerah dan lokal. Program ini bukan merupakan program yang berdiri sendiri tanpa memerlukan dukungan program lain, namun justru melalui program inilah diharapkan dapat dipadukan berbagai program sektoral maupun regional yang diarahkan untuk pembangunan wilayah dan masyarakat desa.

Sejak awal kemerdekaan, kemandirian sejati telah tegas digariskan sebagai cita-cita nasional yang harus direalisasi, mewujudkan *onafhankelijkheid*, melepaskan diri dari ketergantungan. Selanjutnya pada awal Orde Baru, yang mewarisi kebangkrutan ekonomi Orde Lama, telah muncul ide mengenai perlunya kita memperoleh pinjaman dari luar-negeri untuk mengangkat perekonomian Indonesia.

Bersamaan dengan itu muncul pula gagasan tentang bagaimana kita harus berhati-hati terhadap pinjaman luar-negeri. Misalnya di dalam penggarisan *Tracee Baru* di awal Orde Baru (1966) yang digagas oleh Universitas Indonesia, yang banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh dari Fakultas Ekonomi, sempat dikemukakan tentang syarat-syarat untuk menerima pinjaman luar-negeri, yang intinya menyangkut bunga rendah (bukan *altruisme*) tidak mengikat dan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi yang masing-masing mampu mengembalikan sendiri hutang dan bunganya. *Tracee Baru* yang digelar dan dipelopori orang-orang FEUI masih tegas-tegas mempertahankan Deklarasi Ekonomi (sebagai acuan politik) yang intinya adalah politik ekonomi “berdikari” atau “mandiri”

Dengan demikian dampak positif daripada program ini akan semakin besar dan pada akhirnya kemiskinan dan keterbelakangan secara berangsur-angsur dan pasti dapat ditanggulangi. Sebagai suatu program yang strategis dan koordinatif, dalam pelaksanaan program ini harus dipupuk dan dibina semangat kebersamaan yang tinggi di antara berbagai pihak yang terkait baik yang

berkedudukan "membantu" maupun yang "dibantu" yaitu penduduk desa itu sendiri, termasuk generasi muda dan para Wira Koperasi.

Keterpurukan Indonesia tidak terlepas dari peran kelompok *mainstream* yang saat ini mendominasi pemikiran kaum ekonom Indonesia, padahal basis teori neoklasikal yang melandasi pemikiran mereka saat ini terperangkap ke dalam konservatisme dan konvensionalisme ekonomi, yang boleh dibilang makin obsolit dan ortodoks.

Konservatisme dan ortodoksi ilmu ekonomi *mainstream* telah dengan keras ditentang oleh kaum strukturalis yang telah membuktikan asumsi dasar ekonomi neo-klasikal yang berdasar *self-interest* tidak lagi valid, bahkan telah membentuk akhlak ekonomi yang makin jauh dari hakikat ilmu ekonomi sebagai *a moral science*. Dari asumsi itu telah terjadi suatu *self-fulfilling prophesy* yang menciptakan *mindset* ekonomi dan membentuk para pelaku ekonomi benar-benar menjadi *homo-economicus*, meninggalkan moralitasnya sebagai *homo-ethicus*. Ilmu ekonomi akhirnya berada dalam suatu berantakan (*turmoil*). Fundamentalisme pasar, sebagai inherensi asumsi dasar *self-interest*, mempergiat keterjerumusan ini. Kelompok *mainstream* menjadi identik dengan kelompok *market fundamentalists*.

Dengan memperhatikan kenyataan bahwa kelembagaan sosial di pedesaan dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada belum memadai untuk mengembangkan usaha ekonomi desa, serta keterbatasan akses KUBA terhadap berbagai fasilitas permodalan yang disediakan pemerintah, maka diperlukan upaya khusus untuk penguatan kelembagaan dan manajemen KUBA melalui pendekatan kelompok agar lebih berdaya dalam mengakses fasilitas permodalan dari sumber-sumber per-bank-an.

Perkembangan perekonomian di seluruh Indonesia berjalan sesuai sistem perekonomian yang terjadi di pasar. Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki hak otonomi daerah secara peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan tingkat perkembangan ekonomi tersendiri. Kota Singkawang yang letaknya dipesisir pantai dan dikelilingi oleh gunung-gunung memberikan kesan dan keindahan alam tersendiri. Dengan posisi letaknya yang demikian menjadikan Kota Singkawang banyak menyimpan objek-objek wisata menarik dan berpotensi untuk dikembangkan serta memberikan peluang investasi bagi para investor khususnya dalam bidang perhotelan, transportasi, restoran, resort serta pengembangan sarana prasarana pendukung wisata lainnya.

Adapun data aset ekonomi dan sosial keluarga Kelurahan Tengah pada 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.3
DATA ASET EKONOMI DAN SOSIAL KELUARGA
KELURAHAN TENGAH

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			2020	2021
	2	3	4	5
1.	Pengangguran	1.jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	913 orang	913 orang
		2.Jumlah penduduk usia 15-56 orang	1.122 orang	1.122 orang

		3. Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	414 orang	414 orang
		4. Penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	- orang	- orang
2.	Pendapatan	Sumber Pendapatan		
		1. Pertanian	Rp. juta	Rp. juta
		2. Kehutanan	Rp.	Rp.
		3. Perkebunan	Rp. juta	Rp. juta
		4. Peternakan	Rp. juta	Rp. juta
		5. Perikanan	Rp. juta	Rp. juta
		6. Perdagangan	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
		7. Jasa	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
		8. Usaha Penginapan/ Hotel dan sejenisnya	Rp.	Rp.
		9. Pariwisata	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
		10. Industri rumah tangga	Rp. -	Rp. -
3.	Kelembagaan Ekonomi	1. Pasar	Ada	Ada
		2. Lembaga Koperasi/ sejenisnya	Tidak	Tidak
		3. BUMdes	Tidak	Tidak
		4. Toko/kios	Ada	Ada
		5. Warung makan	Ada	Ada
		6. Angkutan	Ada	Ada
		7. Pangkalan ojek, becak, delman atau sejenisnya	Tidak	Tidak
4.	Tingkat Kesejahteraan	1. Jumlah Keluarga	614 Kel	619 Kel
		2. Jumlah Keluarga Prasejahtera	257 Kel	257 Kel
		3. Jumlah keluarga Sejahtera 1	557 Kel	557 Kel
		4. Jumlah Keluarga Sejahtera 2	34 Kel	34 Kel

		5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3	- Kel	- Kel
		6. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus	- Kel	- Kel

3.5 PARTISIPASI ANGGOTA KELUARGA DALAM PROSES PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

Hingga kini masih banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Sebagian besar permasalahan tersebut adalah warisan dari Pemerintahan yang bernuansa sentralistik, sebagian lainnya merupakan hasil dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa ciri dari Pemerintahan yang bernuansa sentralistik antara lain adalah sebagai berikut:

- Banyaknya kebijakan Pemerintah yang bernuansa **“top-down”**, sehingga dominasi Pemerintah Pusat sangat tinggi. Akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Lebih jauh dampaknya akan menimbulkan perbedaan dan konflik-konflik sosial dan lingkungan yang menjadi mahal untuk mengatasinya.
- Rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja bersama masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak terfahaminya masalah yang sebenarnya terjadi dan berkembang di masyarakat. Dampaknya antara lain beberapa kegiatan Pemerintah tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat setempat sehingga akhirnya tidak menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
- Kurang terbukanya Pemerintah dalam proses penyelenggaraan pembangunan menunjukkan masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah. Masyarakat belum menjadi subyek pembangunan atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak).

Dengan kuatnya kebijakan sentralisasi tersebut membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat. Kondisi tersebut nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintah di daerah.

Sementara itu dalam era otonomi daerah, tuntutan dan harapan daerah, khususnya masyarakat, antara lain mencakup hal-hal berikut:

- Penguatan peran masyarakat (tidak sekedar peranserta masyarakat) yaitu menempatkan masyarakat secara bertahap dalam posisi menjadi tuan dan terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan;
- Penguatan semangat *good governance* yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan;
- Lebih mendesentralisasikan proses penyelenggaraan pembangunan kepada daerah, sehingga Pemerintah Pusat dituntut untuk lebih banyak menyusun dan mengembangkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual serta memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang memang diminta dan diharapkan oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut yang secara mendasar membedakan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan pada masa Pemerintahan yang bernuansa sentralistik dan Pemerintahan yang desentralistik seperti yang diharapkan sekarang ini.

Dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dimana masyarakat dan Pemerintah lebih dekat dan bersama-sama dalam menyelenggarakan pembangunan, maka Pemerintah diharapkan mampu secara efektif membaca kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Agar lebih efektif, diharapkan masyarakat, dalam hal ini komunitas Pesantren bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk mampu memformulasikan masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat dan dapat menyampaikannya kepada Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka paradigma *community driven development* yaitu penciptaan iklim untuk memberi penguatan peran masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ikut menggerakkan atau mensosialisasikan, ikut melaksanakan pembangunan, dan melakukan kontrol publik menjadi sangat signifikan.

Hal itu bisa terkait dengan perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan berbagai macam program sesuai dengan permasalahan dan urutan prioritasnya yang melalui proses demokratis, inklusif, dan transparan yang disepakati untuk ditangani bersama. Dengan demikian nantinya pembangunan, khususnya Kimpraswil, diarahkan untuk mampu memperbanyak pilihan-pilihan yang dapat diambil dan dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat.

Memperhatikan hal-hal tersebut serta prioritas-prioritas pembangunan nasional dan dalam upaya percepatan pelaksanaan otonomi daerah menuju terwujudnya *good governance*, maka program bidang Kimpraswil disusun secara sinergi antara berbagai prioritas pembangunan daerah dengan dukungan prasarana dan sarana wilayah serta memperhatikan berbagai upaya penanganan permasalahan strategis nasional, termasuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Prioritas program pembangunan Kimpraswil yang dimaksud mencakup 4 (empat) kelompok sasaran yaitu :

- a. Pembangunan dengan pendekatan pengembangan wilayah;
- b. Penanganan permasalahan yang bersifat strategis nasional;
- c. Fasilitasi pembangunan daerah untuk mempercepat desentralisasi; dan
- d. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan dalam rangka perwujudan "*good governance*".

Keempat sasaran strategis tersebut tidak berarti hanya merupakan program yang dibiayai sepenuhnya dari anggaran pusat, namun lebih sebagai media sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah di bidang Kimpraswil.

Untuk mendukung strategi tersebut, program pembangunan Kimpraswil diarahkan untuk mempertahankan dan memperluas jangkauan pelayanan jasa transportasi darat, laut, dan udara sebagai struktur wilayah; untuk meningkatkan tersedianya air baku serta dukungan jaringan irigasi; untuk memantapkan fungsi perkotaan; dan ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Walaupun program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan program daerah, namun Departemen Kimpraswil akan mendukung melalui program-program pembangunan permukiman dan prasarana **di daerah kumuh** perkotaan maupun prasarana perdesaan yang relatif tertinggal. Dalam penanggulangan kemiskinan tersebut juga terus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar di bidang perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat

berpenghasilan rendah, antara lain melalui pembangunan rumah sangat sederhana, rumah sederhana, dan rumah susun sederhana.

Selain itu Departemen Kimpraswil juga terus mendorong bertumbuh kembangnya upaya yang dilakukan oleh UKMK, dan juga melakukan berbagai upaya-upaya seperti mendorong **Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Masyarakat (P2BPM)** melalui **Program Tribina** (bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan), penataan lingkungan permukiman kumuh baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dorongan tersebut juga dilakukan melalui paket program yang mencakup komponen pemberdayaan sosial kemasyarakatan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, pendayagunaan prasarana dan sarana, bantuan bergulir yang bersifat stimulatif untuk memugar rumah yang tidak/kurang layak huni, dan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat sudah sewajarnya ikut melakukan (berperan) atau dengan kata lain Pemerintah harus bekerja bersama masyarakat, karena pada hakekatnya Pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat. Upaya ini merupakan rangkaian proses untuk **menuju penguatan peran masyarakat**, bukan sekedar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (*community driven development*).

Dengan kuatnya peran masyarakat, maka penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, berakhlak, dan berorientasi pada rakyat atau dengan kata lain bernuansa *good governance* di segala lapisan.

Adapun data partisipasi masyarakat Kelurahan Tengah pada 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.4
DATA PARTISIPASI MASYARAKAT
KELURAHAN TENGAH

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Pemilihan Umum	1. Legislatif		
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	- orang	- orang
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	- orang	- orang
		2. Presiden/wakil Presiden	orang	orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	- orang	- orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	- orang	- orang
2.	Pemilihan Kepala Daerah	1. Gubernur/ Wakil Gubernur	orang	orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	- orang	- orang
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	- orang	- orang

		2. Walikota/Wakil Walikota	orang	orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	1.123 orang	1.123 orang
		• Jumlah Penduduk menggunakan hak pilih	987 orang	987 orang
3.	Pemilihan Kepala Desa	Cara penentuan Kepala Desa/Sebutan lain	-	-
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	- orang	- orang
		• Jumlah Penduduk menggunakan hak pilih	- orang	- orang
4	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	1. Jumlah penduduk yang ikut dalam Musrenbang	40 orang	42 orang
		2. Jumlah peserta Laki-laki	25 orang	26 orang
		3. Jumlah peserta perempuan	15 orang	16 orang
5	Kegotong-royongan Penduduk	1. Jumlah kegiatan Gotong royong dalam membangun rumah	- kali	- kali
		2. Jumlah kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota	6 kali	7 kali
		3. Jumlah Kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota	6 kali	5 kali
		4. Jumlah kegiatan gotong- royong membangun jalan/ jembatan	1 kali	2 kali
		5. Jumlah kegiatan gotong royong membangun saluran irigasi	1 kali	2 kali
		6. Jumlah kegiatan gotong royong penanggulangan bencana	- kali	- kali
		7. Kegiatan gotong royong lainnya	8 kali	8 kali
		8. Kegiatan bulan bakti gotong royong	3 kali	4 kali

3.6 BERBAGAI PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta "kulawarga". Kata kula berarti "ras" dan warga yang berarti "anggota". Keluarga adalah lingkungan di mana terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari 2 (dua) pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Ada beberapa tipe keluarga yakni keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak atau anak-anak, keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anak mereka, dimana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua.

Selain itu terdapat juga keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek.

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

Berbagai **peranan** yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut :

- ❖ Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
- ❖ Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
- ❖ Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Pada dasarnya **tugas keluarga** ada 8 (delapan) tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya.
- 2) Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga.
- 3) Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
- 4) Sosialisasi antar anggota keluarga.
- 5) Pengaturan jumlah anggota keluarga.
- 6) Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga.
- 7) Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas.
- 8) Membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya.

Fungsi yang dijalankan keluarga adalah :

- 1) Fungsi Pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.
- 2) Fungsi Sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- 3) Fungsi Perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
- 4) Fungsi Perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.

- 5) Fungsi Agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.
- 6) Fungsi Ekonomi dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- 7) Fungsi Rekreatif dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, seperti acara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan lainnya.
- 8) Fungsi Biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya.
- 9) Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga.

Jika kita cermati secara mendalam, selama ini pemerintah mengelompokkan keluarga di Indonesia ke dalam 2 (dua) tipe. **Pertama, tipe keluarga pra-sejahtera.** Yang kita bayangkan ketika mendengar keluarga tipe ini adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga pra-sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

Kedua, tipe keluarga sejahtera. Yang terbayang ketika mendengar keluarga tipe ini adalah sebuah keluarga yang sudah tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

Selama ini konsentrasi pembinaan terhadap keluarga yang dilakukan oleh pemerintah adalah menangani keluarga pra-sejahtera. Hal itu terlihat dari program-program dasar pembinaan keluarga seperti perencanaan kelahiran (KB), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), pelayanan kesehatan gratis, pembinaan lansia, pengadaan rumah khusus keluarga pra-sejahtera dan sejenisnya. Keberpihakan ini kiranya wajar mengingat bahwa pemerintah perlu melakukan pemerataan kemiskinan.

Namun demikian, jika kita cermati dari tahun ke tahun terkesan bahwa program pembinaan keluarga menjadi jalan di tempat. Jika kita berani melakukan refleksi atas hasil pembinaan yang selama ini dilakukan, dapat terlihat beberapa gejala sebagai berikut :

- (1) **Pertama, walaupun sudah dilakukan pembinaan bertahun-tahun masih banyak keluarga yang mengikuti program-program secara pasif partisipatif.** Artinya, berlangsung tidaknya program-program pembinaan keluarga sangat bergantung pada aktif tidaknya para kader penggerak. POSYANDU misalnya, masyarakat masih harus terus menerus disadarkan akan pentingnya pemeriksaan balita secara rutin tetapi masyarakat tidak kunjung sadar juga. Sedikit sekali anggota masyarakat yang secara aktif proaktif mengikuti program-program pembinaan keluarga berencana.
- (2) **Kedua, masyarakat menganggap bahwa program pembinaan keluarga identik dengan program pemberian bantuan tertentu.** Obat-obatan gratis/murah, beras murah, dan paket-

paket lain yang berbau bantuan sangat melekat dengan program-program pembinaan keluarga. Akibatnya, keluarga yang merasa tidak membutuhkan bantuan seperti itu merasa enggan terlibat dalam program pembinaan keluarga. Padahal upaya peningkatan kesejahteraan keluarga seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat dari berbagai lapisan, bukan sekedar pengentasan kemiskinan atau mengubah keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera.

- (3) ***Ketiga, program pembinaan keluarga identik dengan program pembinaan keluarga miskin.*** Banyak keluarga muda merasa enggan terlibat dalam program pembinaan keluarga karena merasa risi diperlakukan seolah-olah mereka adalah keluarga yang perlu dibantu secara ekonomi, masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang hidup berkeluarga, masih perlu diberi pengarahan masalah KB, dan sebagainya. Padahal, sebagian besar keluarga muda sudah mendapat pengarahan seperti itu sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Cap atau identikasi seperti ini sangat menghambat keberhasilan program pembinaan keluarga.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kiranya perlu dilakukan pembenahan di mana *keluarga diarahkan untuk menjadi keluarga yang secara sadar dan proaktif berjuang menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera*. Istilah yang kiranya tepat dan berbau promotif adalah **membangun keluarga kreatif**, yaitu keluarga yang mampu mengenali permasalahan keluarganya masing-masing, mencari alternatif dalam mengatasi masalah, dan secara proaktif merencanakan masa depan sendiri sesuai situasi dan kondisi masing-masing.

Persoalannya adalah bagaimana kita mampu melakukan pembinaan terhadap keluarga agar berkembang menjadi keluarga kreatif. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan.

Pertama, membentuk forum diskusi keluarga di berbagai tingkat. Forum diskusi keluarga ini merupakan sebuah forum untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Dalam forum diskusi ini diharapkan dapat tergali permasalahan-permasalahan riil yang dihadapi oleh keluarga setempat. Hal ini berbeda dengan konsep yang selama ini dijalankan yaitu konsep penyuluhan di mana anggota masyarakat cenderung diceramahi bukan didengarkan.

Kedua, melakukan pembinaan dan pendampingan manajemen ekonomi keluarga. Dalam hubungannya dengan masalah perekonomian keluarga, selama ini pembinaan dikonsentrasikan pada upaya memberikan bantuan gizi dan kesehatan, serta upaya penghematan pengeluaran keluarga dan gemar menabung. Kadang-kadang dalam pertemuan didatangkan sejumlah sales untuk memberikan fasilitas tertentu seperti kredit murah peralatan keluarga. Strategi ini tampaknya perlu diubah ke arah pendampingan dalam menata perekonomian keluarga. Dengan demikian pembinaannya nanti lebih mengarah pada upaya mencari alternatif *income* dan penyelarasan belanja keluarga sesuai dengan penghasilan masing-masing. Kiranya inilah kuncinya, selama ini banyak keluarga bermasalah karena tidak berimbangnya antara pendapatan keluarga dan pengeluarannya.

Ketiga, pembinaan kewirausahaan. Masalah pokok keluarga adalah masalah pendapatan. Dan masalah pendapatan selalu bersumber pada masalah pekerjaan. Maka, solusi yang paling tepat adalah memberikan lapangan kerja bagi keluarga. Namun, hal itu sangat sulit diwujudkan jika pemerintah harus menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Solusinya adalah masyarakat harus menciptakan lapangan kerja sendiri. Untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, masyarakat perlu dididik untuk berwirausaha. Maka, pembinaan ke arah kewirausahaan menjadi alternatif untuk menciptakan keluarga yang kreatif.

Keempat, pemberian bantuan modal usaha. Sebenarnya banyak anggota masyarakat yang termotivasi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dengan berwirausaha. Namun, sebagian besar dari mereka terbentur pada masalah permodalan. Program pembinaan keluarga selama ini belum memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Sebagian besar program pembinaan baru diarahkan pada penambahan keterampilan usaha industri rumah tangga. Kiranya perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga-keluarga yang mau menjadi keluarga kreatif ini.

Kelima, pendidikan kreativitas. Menjadi manusia kreatif tidaklah mudah. Ia harus mampu menganalisis situasi untuk membuat sebuah langkah yang benar-benar kreatif dalam memecahkan masalah keluarga. Oleh sebab itu diperlukan peran para psikolog dalam membantu keluarga agar menjadi keluarga yang kreatif baik kreatif dalam mencari peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun kreatif dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Dan pendampingan atau pendidikan kreativitas ini perlu diberikan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat kesejahteraan keluarga masing-masing.

Kreatifitas dalam memecahkan masalah keluarga kiranya menjadi kunci utama dalam pembinaan keluarga di masa mendatang. Hal ini dilatarbelakangi adanya semangat otonomi dalam berbagai sektor, termasuk otonomi keluarga. Jika selama ini terkesan bahwa pembinaan keluarga terlalu mengintervensi keluarga (misalnya PNS harus mengikuti program KB) maka di masa mendatang hal itu tidak akan dirasakan lagi. Dan pada akhirnya secara perlahan-lahan masalah kesejahteraan keluarga dapat dikembalikan pada masyarakat itu sendiri.

Jika saja banyak keluarga Indonesia yang berkembang ke arah keluarga kreatif, dapat diyakini bahwa semakin hari semakin banyak keluarga Indonesia yang mampu mewujudkan diri menjadi keluarga yang sehat, sejahtera, sekaligus mandiri. Jika demikian, pemerintah tidak perlu lagi terlalu banyak mengeluarkan anggaran yang bersifat konsumtif untuk masyarakat. Jika anggaran konsumtif yang selama ini dikenal sebagai subsidi dapat ditekan seminimal mungkin, maka secara perlahan-lahan perekonomian negara menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya keluarga sehat, sejahtera, mandiri dapat terwujud, negara yang sehat, sejahtera, dan mandiri perlahan-lahan dapat terwujud pula.

Namun, sebelum semua itu berlangsung ada satu syarat yang perlu dimiliki yaitu bahwa semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pembinaan keluarga harus pula memiliki kemampuan kreatifitas tinggi dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan demikian, upaya pembinaan keluarga tidak sekedar mengikuti pola-pola pembinaan tahun-tahun sebelumnya melainkan secara terus menerus dimunculkan konsep pembinaan yang baru dan lebih inovatif.

Adapun data kegiatan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Tengah pada 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.5
DATA KEGIATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN TENGAH

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Realisasi 10 Program Pokok PKK	1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	1 keg	1 keg

		2. Gotong Royong	1 keg	1 keg
		3. Pangan	1 keg	1 keg
		4. Sandang	1 keg	1 keg
		5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga	1 Keg	1 keg
		6. Pendidikan dan keterampilan	1 Keg	1 keg
		7. Kesehatan	1 Keg	1 keg
		8. Pengemban Kehidupan Berkoperasi	1 Keg	1 keg
		9. Pelestarian lingkungan Hidup	1 Keg	1 keg
		10. Perencanaan sehat	1 Keg	1 keg
2.	Organisasi PKK	Kelengkapan :		
		1. Kelompok Kerja	Ada	Ada
		2. Kelompok Dasa Warsa	Ada	Ada

3.7 PERKEMBANGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LINGKUNGANNYA

Pengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan *top-down* dengan sistem sentralistik, tidak berhasil di bidang sosial maupun politik; meskipun di bidang ekonomi cukup menggembirakan. Implementasi pendekatan dan sistem pembangunan tersebut mengakibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, bukan dalam pengertian partisipasi, tetapi lebih pada dimobilisasi. Karena itu, kegiatan pembangunan makin menjadikan masyarakat bergantung terhadap input-input dari pemerintah.

Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif dan tidak inovatif. Secara politik, dengan pendekatan *top-down* dan sistem sentralistik tersebut hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memudar diakibatkan oleh mudarnya sejumlah lembaga tradisional yang dulu hidup di pedesaan, sebagai akibat intervensi pemerintah yang terlalu jauh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam era reformasi muncul berbagai spekulasi beberapa kelompok masyarakat dan para elit politik serta sebagian kalangan akademisi terhadap penyebab terjadinya krisis multi dimensional yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Setelah tidak berkuasa lagi, Orde Baru menjadi sasaran tembak lawan politik, hampir semua kesalahan dialamatkan pada rezim ini, sehingga seakan tak ada keberhasilan yang patut diberikan apresiasi positif dan patut untuk dilanjutkan.

Penguasa Orde Baru dinilai telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Reformasi politik telah membuka peluang bagi pengembangan demokrasi dan pemerintahan yang efektif di Indonesia. Namun setelah hampir satu dekade berjalan, apa yang diimpikan oleh rakyat Indonesia masih jauh dari kenyataan.

Oleh karena itu, diperlukan agenda dari semua pihak secara lebih serius untuk penguatan kapasitas individu dan lembaga pada semua institusi kunci, terutama pada partai politik, lembaga pemerintahan (birokrasi), dan *civil society organizations*.

Demokratisasi sebagai salah satu pilar utama atau kata kunci yang digunakan Orde Reformasi untuk memobilisasi masyarakat dalam melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan dan sistem sosial ternyata belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan rakyat. Bahkan berbagai kebijakan yang diambil tidak jarang justru memicu terjadinya benturan (politik) yang telah mengarah pada konflik horizontal dan ancaman desintegrasi.

Perjuangan atau gerakan demokratisasi, pada lingkup pemerintahan merupakan langkah perbaikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang *legitimate* dan demokratis. Terkait dengan wacana *civil society*, berkembang pemikiran, bahwa untuk mewujudkan bangsa yang demokratis, harus dimulai dari bawah atau dari masyarakat akar rumput.

Karena berdasarkan pengalaman, masyarakat akar rumput tersebut selama berabad-abad telah terjadi praktek-praktek demokrasi yang benar. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya pembangunan demokrasi, perlu belajar kembali tentang kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat akar rumput.

Dalam perspektif pembangunan, nilai sosial budaya dan organisasi lokal tersebut merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau modal sosial (*social capital*) dalam rangka pembangunan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan organisasi dan kearifan lokal tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan demokrasi. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penelitian dalam upaya melihat potensi organisasi lokal dalam rangka pembangunan nilai-nilai demokrasi.

Adapun data kegiatan Perkembangan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Tengah pada 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.6
DATA PERKEMBANGAN TRANTIB
KELURAHAN TENGAH

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Konflik Sara	1. Konflik antar kelompok	- kasus	- kasus
		2. Konflik antar etnis	- kasus	- kasus
		3. Konflik berbau agama	- kasus	- kasus
2	Perkelahian	1. Kasus Perkelahian	1 kasus	1 kasus

		2. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	- kasus	- kasus
		3. Kasus perkelahian yang meninggalkan luka parah	- kasus	- kasus
3	Pencurian dan Perampokan	1. Kasus pencurian/ perampokan	- kasus	- kasus
		2. Kasus pencurian/ perampokan dengan kekerasan	- kasus	- kasus
		3. Kasus Pencurian/ perampokan dengan pelaku dari desa setempat	- kasus	- kasus
4	Perjudian	Kasus Perjudian	- kasus	- kasus
5	Narkoba	1. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku penduduk setempat	- kasus	- kasus
		2. Jumlah Kasus Penduduk yang menjadi korban narkoba	- kasus	- kasus
6	Prostitusi	Kasus Protistusi	Tidak	Tidak
7	Pembunuhan	1. Jumlah kasus pembunuhan	- kasus	- kasus
		2. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk setempat	- kasus	- kasus
		3. Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk desa setempat	- kasus	- kasus
8	Kejahatan Seksual	1. Jumlah kasus perkosaan	- kasus	- kasus
		2. Jumlah kasus perkosaan pada anak	- kasus	- kasus
		3. Jumlah kasus kehamilan di luar nikah	- kasus	- kasus
9	Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Kekerasan terhadap isteri	- kasus	- kasus
		2. Kekerasan terhadap suami	- kasus	- kasus
		3. Kekerasan terhadap anak	- kasus	- kasus
		4. Kekerasan terhadap anggota keluarga lain	- kasus	- kasus
10	Penculikan	Jumlah kasus penculikan	- kasus	- kasus
11	Partisipasi masyarakat dalam Keamanan Swakarsa	1. Jumlah Pos siskamling	2 unit	2 unit
		2. Jumlah anggota hansip	4 orang	4 orang
		3. Jumlah kelompok ronda	1 kel	1 kel



BAB IV POTENSI KELURAHAN

Data Potensi Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat terdiri atas sebagai berikut :

4.1 DATA SUMBER DAYA ALAM

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus dapat dioptimalkan, karena sumberdaya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, maka kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya :

- a) mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan **daya dukung dan daya tampungnya**;
- b) menegakkan hukum secara adil dan konsisten **untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan**;
- c) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;
- d) **memberdayakan masyarakat** dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
- e) menerapkan secara efektif penggunaan **indikator-indikator** untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- f) memelihara **kawasan konservasi** yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan
- g) mengikutsertakan masyarakat dalam rangka **menanggulangi** permasalahan lingkungan global.

1) **Potensi Umum yang meliputi :**

– **Batas dan luas wilayah**

Wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat memiliki batas dan luas wilayah yang secara jelas dapat diketahui. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan adalah :

Sebelah Utara	:	Sungai Singkawang
Sebelah Selatan	:	Sungai Singkawang
Sebelah Timur	:	Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat
Sebelah Barat	:	Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat merupakan salah satu dari 4 (empat) kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan. Luas wilayah Kelurahan Sagatani adalah ± 18 Ha.

– **Iklim**

Secara umum wilayah Kota Singkawang beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara **21,8^o sampai dengan 30,05^o Celcius**. Kondisi iklim di wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat cukup beragam sesuai kondisi wilayah negara Indonesia yang berada pada kawasan tropis. Adapun data iklim/curah hujan periode 5 (lima) tahun terakhir di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.1
DATA IKLIM
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	KONDISI	RINCIAN
1	2	3
1	Curah hujan	3.316 mm
2	Jumlah bulan hujan	11 Bulan
3	Kelembaban	90 %
4	Suhu rata-rata harian	31 °C
5	Tinggi tempat dari permukaan laut	15 - 500 mdl

– **Jenis dan kesuburan tanah**

Kota Singkawang yang merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat merupakan wilayah yang memiliki kawasan tanah yang bersifat asam. Sebagai sumberdaya alam untuk budidaya tanaman, tanah mempunyai dua fungsi, yaitu: (1) sebagai sumber penyedia unsur hara

dan air; dan (2) tempat akar berjangkar. Salah satu atau kedua fungsi ini dapat menurun, bahkan hilang.

Secara antropogenik adalah karena ulah manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak terkendali, sehingga terjadi kerusakan ekosistem. Misalnya, deforestasi dan degradasi hutan, eksploitasi deposit bahan tambang, terungkapnya unsur atau senyawa beracun bagi tanaman, pengeringan ekstrem pada tanah gambut, serta kebakaran.

Tanah yang sehat akan memberikan sumbangan yang besar terhadap kualitas tanah. Kualitas tanah dapat sebagai sifat atau atribut *inherent* tanah yang dapat digambarkan dari sifat-sifat tanah atau hasil observasi tidak langsung, dan sebagai kemampuan tanah untuk menampakkan fungsi-fungsi produktivitas lingkungan dan kesehatan.

Pengukuran kualitas tanah merupakan dasar untuk penilaian keberlanjutan pengelolaan tanah yang dapat diandalkan untuk masa-masa yang akan datang, karena dapat dipakai sebagai alat untuk menilai pengaruh pengelolaan lahan. Pada umumnya proses degradasi tanah dalam sistem pertanian dapat disebabkan oleh erosi, pemadatan, penurunan ketersediaan hara atau penurunan kesuburan, kehilangan bahan organik tanah dan lain lain.

Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau *attribute* yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan (*performance*) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (*land characteristics*). Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik lahan.

Ada **4 (empat) kelompok kualitas lahan utama**: (a) Kualitas lahan ekologis yang berhubungan dengan kebutuhan tumbuhan seperti ketersediaan air, oksigen, unsur hara dan radiasi (b) Kualitas yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan normal, seperti kemungkinan untuk mekanisasi pertanian (c) Kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan, seperti respon terhadap pemupukan, kemungkinan untuk irigasi dan lain-lain (d) Kualitas konservasi yang berhubungan dengan erosi.

Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) faktor utamayaitu topografi, tanah dan iklim. Karakteristik lahan tersebut terutama topografi dan tanah merupakan unsur pembentuk satuan peta tanah.

Produktivitas tanah merupakan kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan produk tertentu suatu tanaman dibawah suatu sistem pengelolaan tanah tertentu. Suatu tanah atau lahan dapat menghasilkan suatu produk tanaman yang baik dan menguntungkan maka tanah dikatakan produktif. Produktivitas tanah merupakan perwujudan darifaktor tanah dan non tanah yang mempengaruhi hasil tanaman.

Tanah produktif harus mempunyai kesuburan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Akan tetapi tanah subur tidak selalu berarti produktif. Tanah subur akan produktif jika dikelola dengan tepat, menggunakan jenis tanaman dan teknik pengelolaan yang sesuai. Kesuburan tanah adalah kemampuan atau kualitas suatu tanah menyediakan unsur hara tanaman dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tanaman, dalam bentuk senyawa-senyawa yang dapat dimanfaatkan tanaman dan dalam perimbangan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman tertentu dengan didukung oleh faktor pertumbuhan lainnya.

TABEL 4.2
DATA JENIS DAN KESUBURAN TANAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS TANAH	LUAS
1	2	3
1	Warna tanah (sebagian besar)	Merah/kuning/hitam/abu-abu
2	Tekstur tanah	Lampungan/pasiran/debuan
3	Tingkat kemiringan tanah	0 - 109 derajat
4	Lahan kritis	ha/m ²
5	Lahan terlantar	ha/m ²

TABEL 4.3
DATA EROSI TANAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS EROSI	LUAS
1	2	3
1	Luas tanah erosi ringan	- ha/m ²
2	Luas tanah erosi sedang	- ha/m ²
3	Luas tanah erosi berat	- ha/m ²
4	Luas tanah yang tidak ada erosi	- ha/m ²
	TOTAL LUAS	- ha/m ²

Jenis dan kesuburan tanah di wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Selatan cukup member potensi dalam upaya peningkatan mata pencaharian pokok masyarakat Kelurahan Tengah. Masyarakat Kelurahan Tengah memanfaatkan lahan/tanah mereka untuk:

a) Tanaman hortikultura lainnya.

– **Orbitasi**

Sekilas informasi mengenai kondisi Kota Singkawang yaitu Kota Singkawang memiliki luas 50.400 ha, yang dibagi menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan meliputi 26 Kelurahan. **Secara geografis terletak pada posisi antara 108° 52' 14,19" sampai dengan 109° 09' 44,22 " Bujur Timur dan 00° 44' 57,57" sampai dengan 01° 00' 48,65" Lintang Utara.** Berjarak ± 147 km dari ibukota Propinsi (Pontianak) dan dapat dicapai melalui transportasi darat maupun laut (pelabuhan Singkawang).

Dengan batas-batas wilayah: di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selakau Kabupaten sambas; di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Bengkayang; sebelah Barat berbatasan dengan laut Natuna; dan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

Data mengenai orbitasi wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.4
DATA ORBITASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	KONDISI	RINCIAN
1	2	3
1	Jarak ke ibukota kecamatan	2 km
2	Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 Menit
3	Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor	1 jam
4	Kendaraan umum ke ibukota kecamatan	-
5	Jarak ke ibukota kota	1 km
6	Lama jarak tempuh ke ibukota kota dengan kendaraan bermotor	30 Menit
7	Lama jarak tempuh ke ibukota kota dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor	1.5 jam
8	Kendaraan umum ke ibukota kota	-
9	Jarak ke ibukota propinsi	185 km
10	Lama jarak tempuh ke ibukota propinsi dengan kendaraan bermotor	4 jam
11	Lama jarak tempuh ke ibukota propinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor	48 jam
12	Kendaraan umum ke ibukota propinsi	-

– **Bentangan wilayah dan letak**

Kota Singkawang yang letaknya dipesisir pantai dan dikelilingi oleh gunung-gunung memberikan kesan dan keindahan alam tersendiri. Dengan posisi letaknya yang demikian menjadikan Kota Singkawang banyak menyimpan objek-objek wisata menarik dan berpotensi untuk dikembangkan serta memberikan peluang investasi bagi para investor khususnya dalam bidang perhotelan, transportasi, restoran, resort serta pengembangan sarana prasarana pendukung wisata lainnya.

Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah bentuk wilayah (relief) atau lereng dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Relief erat hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Sedangkan faktor ketinggian tempat di atas permukaan laut berkaitan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang berhubungan dengan temperatur udara dan radiasi matahari.

TABEL 4.5
BENTANGAN WILAYAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	BENTANGANWILAYAH	RINCIAN	LUAS	
1	2	3	4	
1	Dataran rendah	Ya	18	ha/m ²
2	Berbukit-bukit	TIDAK	-	ha/m ²
3	Dataran tinggi/pegunungan	TIDAK	-	ha/m ²
4	Lereng gunung	TIDAK	-	ha/m ²
5	Tepi pantai/pesisir	Tidak	-	ha/m ²
6	Kawasan rawa	Ya	-	ha/m ²
7	Kawasan gambut	Ya	-	ha/m ²
8	Aliran sungai	Ya	2	ha/m ²
9	Bentangan sungai	Ya	2	ha/m ²

TABEL 4.6
LETAK WILAYAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	LETAK WILAYAH	RINCIAN	LUAS	
1	2	3	4	
1	Kawasan perkantoran	Ya	5	ha/m ²
2	Kawasan pertokoan/bisnis	Ya	2	ha/m ²
3	Kawasan industri	Tidak	-	ha/m ²
4	Kepulauan	Tidak	-	ha/m ²
5	Pantai/pesisir	Tidak	-	ha/m ²
6	Kawasan hutan	Tidak	-	ha/m ²
7	Taman suaka	Tidak	-	ha/m ²
8	Kawasan wisata	Ya	1	ha/m ²
9	Perbatasan dengan negara lain	Tidak	-	ha/m ²
10	Perbatasan dengan propinsi lain	Tidak	-	ha/m ²
11	Perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	-	ha/m ²

12	Perbatasan antar kecamatan lain	Tidak	-	ha/m ²
13	DAS/bantaran sungai	Ya	2	ha/m ²
14	Rawan banjir	Tidak	-	ha/m ²
15	Bebas banjir	Ya	18	ha/m ²
16	Potensial tsunami	Tidak	-	ha/m ²
17	Rawan jalur gempa bumi	Tidak	-	ha/m ²

TABEL 4.7
DATA PENETAPAN BATAS DAN PETA WILAYAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

PENETAPAN BATAS	DASAR HUKUM	PETA WILAYAH
1	2	3
Sudah Ada/Belum	Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang	Ada/Tidak

TABEL 4.8
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAANNYA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PENGGUNAAN	LUAS
1	2	3
1	Luas pemukiman	11 ha/m ²
2	Luas persawahan	- ha/m ²
3	Luas perkebunan	- ha/m ²
4	Luas kuburan	1 ha/m ²
5	Luas pekarangan	0.5 ha/m ²
6	Luas taman	0.5 ha/m ²
7	Perkantoran	5 ha/m ²
8	Luas prasarana umum lainnya	- ha/m ²
	TOTAL LUAS	18 ha/m²

TABEL 4.9
LUAS WILAYAH PENGGUNAAN SAWAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS SAWAH	LUAS
1	2	3
1	Sawah irigasi teknis	- ha/m ²
2	Sawah irigasi ½ teknis	- ha/m ²
3	Sawah tadah hujan	- ha/m ²
4	Sawah pasang surut	- ha/m ²
	TOTAL LUAS	ha/m²

TABEL 4.10
LUAS WILAYAH PENGGUNAAN TANAH KERING
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS TANAH KERING	LUAS
1	2	3
1	Tegal/ladang	- ha/m ²
2	Pemukiman	15 ha/m ²
3	Pekarangan	3 ha/m ²
	TOTAL LUAS	18 ha/m²

TABEL 4.11
LUAS WILAYAH PENGGUNAAN TANAH BASAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS TANAH BASAH	LUAS
1	2	3
1	Tanah rawa	- ha
2	Pasang surut	- ha/m ²
3	Lahan gambut	- ha/m ²
4	Situ/waduk/danau	- ha/m ²
	TOTAL LUAS	ha

TABEL 4.12
LUAS WILAYAH PENGGUNAAN TANAH PERKEBUNAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PERKEBUNAN	LUAS
1	2	3
1	Tanah perkebunan rakyat	ha
2	Tanah perkebunan negara	ha
3	Tanah perkebunan swasta	ha
4	Tanah perkebunan perorangan	ha
	TOTAL LUAS	ha

TABEL 4.13
LUAS WILAYAH PENGGUNAAN FASILITAS UMUM
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS FASILITAS UMUM	LUAS
1	2	3
1	Kas Desa/Kelurahan	- ha/m ²
	a. Tanah bengkok	- ha/m ²
	b. Tanah titi sara	- ha/m ²
	c. Kebun desa	- ha/m ²
	d. Sawah desa	- ha/m ²
2	Lapangan olahraga	1000 m ²
3	Perkantoran pemerintah	1000 m ²
4	Ruang publik/taman kota	2000 m ²
5	Tempat pemakaman desa/umum	3000 m ²
6	Tempat pembuangan sampah	m ²
7	Bangunan sekolah/PT	1000 m ²
8	Pertokoan	1000 m ²
9	Fasilitas pasar	- /m ²
10	Terminal	- ha/m ²
11	Jalan	3000 m ²
12	Daerah tangkapan air	- ha/m ²

13	Usaha perikanan	-	m ²
14	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	-	ha/m ²
	TOTAL LUAS	11	ha

TABEL 4.14
LUAS WILAYAH PENGGUNAAN TANAH HUTAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS HUTAN	LUAS
1	2	3
1	Hutan lindung	ha
2	Hutan produksi	ha/m ²
	a. Hutan produksi tetap	ha/m ²
	b. Hutan terbatas	ha/m ²
3	Hutan konservasi	ha/m ²
4	Hutan Adat	ha/m ²
5	Hutan Asli	ha/m ²
6	Hutan sekunder	ha/m ²
7	Hutan buatan	ha/m ²
8	Hutan mangrove	ha/m ²
9	Hutan suaka	ha/m ²
	a. Suaka alam	ha/m ²
	b. Suaka margasatwa	ha/m ²
10	Hutan rakyat	ha
	TOTAL LUAS	ha

2) Pertanian

TABEL 4.15
DATA PEMILIKAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PEMILIKAN LAHAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah keluarga memiliki lahan pertanian	keluarga
2	Tidak memiliki	keluarga
3	Memiliki kurang 1 ha	keluarga
4	Memiliki 1,0 – 5,0 ha	keluarga
5	Memiliki 5,0 – 10 ha	keluarga
6	Memiliki lebih dari 10 ha	keluarga
7	Jumlah total keluarga petani	keluarga
	TOTAL KELUARGA	keluarga

TABEL 4.16
DATA LUAS TANAMAN PANGAN
MENURUT KOMODITAS
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS PANGAN	LUAS	KOMODITAS
1	2	3	4
1	Jagung	- ha	- ton/ha
2	Kacang kedelai	- ha	- ton/ha
3	Kacang tanah	- ha	- ton/ha
4	Kacang panjang	- ha	- ton/ha
5	Kacang mede	- ha	- ton/ha
6	Kacang merah	- ha	- ton/ha
7	Padi sawah	- ha	- ton/ha
8	Padi ladang	- ha	- ton/ha
9	Ubi kayu	- ha	- ton/ha
10	Ubi jalar	- ha	- ton/ha
11	Cabe	- ha	- ton/ha

12	Bawang merah	- ha	- ton/ha
13	Bawang putih	- ha	- ton/ha
14	Tomat	- ha	- ton/ha
15	Sawi	ha	ton/ha
16	Kentang	- ha	- ton/ha
17	Kubis	- ha	- ton/ha
18	Mentimun	- ha	- ton/ha
19	Buncis	- ha	- ton/ha
20	Brocoli	- ha	- ton/ha
21	Terong	- ha	- ton/ha
22	Bayam	- Ha	- ton/ha
23	Kangkung	- ha	- ton/ha
24	Kacang turis	- ha	- ton/ha
25	Umbi-umbian	- ha	- ton/ha
26	Selada	- ha	- ton/ha
27	Talas	- ha	- ton/ha
28	Wortel	- ha	- ton/ha
29	Tumpang sari	- ha	- ton/ha
	TOTAL KOMODITAS	ha	ton/ha

TABEL 4.17
DATA PEMILIKAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN BUAH-BUAHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PEMILIKAN LAHAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah keluarga memiliki lahan pertanian	keluarga
2	Tidak memiliki	keluarga
3	Memiliki kurang 10 ha	keluarga
4	Memiliki 10 – 50 ha	- keluarga
5	Memiliki 50 – 100 ha	- keluarga
6	Memiliki 100 – 500 ha	- keluarga

7	Memiliki 500 – 1000 ha	-	keluarga
8	Memiliki lebih dari 1000 ha	-	keluarga
9	Jumlah total keluarga pertanian		keluarga
	TOTAL KELUARGA		keluarga

TABEL 4.18
DATA LUAS TANAMAN BUAH
MENURUT KOMODITAS
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS BUAH	LUAS	KOMODITAS
1	2	3	4
1	Jeruk	- ha	- ton/ha
2	Alpoket	- ha	- ton/ha
3	Mangga	- ha	- ton/ha
4	Rambutan	- ha	- ton/ha
5	Manggis	- ha	- ton/ha
6	Salak	- ha	- ton/ha
7	Apel	- ha	- ton/ha
8	Pepaya	- ha	- ton/ha
9	Belimbing	- ha	- ton/ha
10	Durian	- ha	- ton/ha
11	Sawo	- ha	- ton/ha
12	Duku	- ha	- ton/ha
13	Kokosan	- ha	- ton/ha
14	Pisang	- ha	- ton/ha
15	Markisa	- ha	- ton/ha
16	Lengkeng	- ha	- ton/ha
17	Semangka	- ha	- ton/ha
18	Limau	- ha	- ton/ha
19	Jeruk nipis	- ha	- ton/ha
20	Melon	- ha	- ton/ha

21	Jambu air	- ha	- ton/ha
22	Nangka	- ha	- ton/ha
23	Sirsak	- ha	- ton/ha
24	Kedondong	- ha	- ton/ha
25	Anggur	- ha	- ton/ha
26	Melinjo	- ha	- ton/ha
27	Nenas	- ha	- ton/ha
28	Jambu klutuk	- ha	- ton/ha
29	Murbei	- ha	- ton/ha
	TOTAL KOMODITAS	ha	ton/ha

TABEL 4.19
DATA PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN BUAH-BUAHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PEMASARAN	RINCIAN
1	2	3
1	Dijual langsung ke konsumen	Ya
2	Dijual ke pasar	Ya
3	Dijual melalui KUD	Tidak
4	Dijual melalui tengkulak	Tidak
5	Dijual melalui pengecer	Ya
6	Dijual ke lumbung kelurahan	Tidak
7	Tidak dijual	Tidak

TABEL 4.20
DATA LUAS TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
MENURUT KOMODITAS
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS TANAMAN	LUAS	KOMODITAS
1	2	3	4
1	Jahe	0,1 ha	ton/ha
2	Kunyit	0,1 ha	ton/ha
3	Lengkuas	0,1 ha	ton/ha
4	Mengkudu	- ha	ton/ha
5	Daun dewa	- ha	ton/ha
6	Kumis kucing	- ha	ton/ha
7	Buah merah	- ha	- ton/ha
8	Sambiloto	- ha	ton/ha
9	Temulawak	0,1 ha	ton/ha
10	Temu hitam	- ha	ton/ha
11	Temu putih	- ha	ton/ha
12	Temu putri	- ha	- ton/ha
13	Temu kunci	- ha	ton/ha
14	Daun sirih	0,1 ha	ton/ha
15	Kayu manis	- ha	- ton/ha
16	Daun sereh	0,1 ha	ton/ha
17	Mahkota dewa	- ha	ton/ha
18	Akar wangi	- ha	- ton/ha
19	Kencur	- ha	ton/ha
20	Jamur	- ha	- ton/ha
21	Dewi-Dewi	- ha	- ton/ha
	TOTAL KOMODITAS	0,6 ha	ton/ha

3) Perkebunan

TABEL 4.21
DATA PEMILIKAN LAHAN PERKEBUNAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PEMILIKAN LAHAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah keluarga memiliki lahan perkebunan	keluarga
2	Tidak memiliki	keluarga
3	Memiliki kurang 5 ha	keluarga
4	Memiliki 10 – 50 ha	- keluarga
5	Memiliki 50 – 100 ha	- keluarga
6	Memiliki 100 – 500 ha	- keluarga
7	Memiliki 500 – 1000 ha	- keluarga
8	Memiliki lebih dari 1000 ha	- keluarga
9	Jumlah total keluarga perkebunan	- keluarga
10	Kepemilikan Usaha Perkebunan yang dimiliki negara	- keluarga
	TOTAL LUAS PERKEBUNAN	Keluarga

TABEL 4.22
DATA LUAS DAN HASIL PERKEBUNAN
MENURUT JENIS KOMODITASNYA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS	SWASTA/NEGARA		RAKYAT	
		LUAS (ha)	HASIL (kw/ha)	LUAS (ha)	HASIL (kw/ha)
1	2	3	4	5	6
1	Kelapa	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
2	Kelapa sawit	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
3	Kopi	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
4	Cengkeh	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
5	Coklat	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
6	Pinang	- ha	- kw/ha	- Ha	- kw/ha
7	Lada	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha

8	Karet	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
9	Jambu mete	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
10	Tembakau	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
11	Pala	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
12	Vanili	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
13	Jarak pagar	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
14	Jarak kepyar	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
15	Tebu	- ha	- kw/ha	Ha	kw/ha
16	Kapuk	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
17	Kemiri	- ha	- kw/ha	Ha	kw/ha
18	Teh	- ha	- kw/ha	- ha	- kw/ha
TOTAL KOMODITAS		- ha	- kw/ha	Ha	kw/ha

TABEL 4.23
DATA PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PEMASARAN	RINCIAN
1	2	3
1	Dijual langsung ke konsumen	Tidak
2	Dijual ke pasar hewan	Tidak
3	Dijual melalui KUD	Tidak
4	Dijual melalui tengkulak	Tidak
5	Dijual melalui pengecer	Ya
6	Dijual ke lumbung kelurahan	Tidak
7	Tidak dijual	Ya

4) Kehutanan

Hutan merupakan karunia Allah yang sangat berharga bagi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Hutan memiliki fungsi ganda baik yang bersifat ekologis, sosial, ekonomi maupun budaya. Untuk itu di dalam mengelola potensi hutan harus memperhatikan sinergi rajutan komponen-komponen baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan.

Rencana dan program kegiatan pembangunan hutan mulai mengalami pergeseran paradigma serta penyesuaian dalam hal kebijakan. Kebijakan yang semula dititik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung ke arah eksploitatif, kini diarahkan pada: 1) pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup; 2) keuntungan ekonomi bergeser menjadi mengutamakan keuntungan social; 3) kelestarian produksi bergeser menjadi kelestarian lingkungan hidup; dan 4) produksi kayu bergeser menjadi mengutamakan produksi non kayu.

Pada umumnya penyusutan luas kawasan hutan produksi dapat diakibatkan karena pengelolaannya yang masih belum sepenuhnya memperhatikan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sedangkan penyusutan luas hutan lindung dan hutan konservasi karena maraknya pencurian dan penebangan liar terutama selama periode reformasi. Besarnya penyusutan hutan akan lebih diakibatkan oleh alih fungsi menjadi tambak dan penebangan. Fenomena ini tampaknya terjadi di Indonesia. Di lain pihak, mulai ada gejala semakin meningkatnya masyarakat pendaya-manfaatan potensi yang ada di dalam laut khususnya kawasan terumbu karang. Hal ini perludicermati untuk mendapat perlakuan perlindungan. Untuk ini upaya rehabilitasi, reboisasi dan perlindungan hutan mendesak untuk dilakukan.

Seiring dengan menjelang digulirnya tata aturan globalisasi maka kehutanan juga mendapat suatu tantangan terutama di dalam menuju ke era ekolabelling untuk ini persyaratan untuk menghasilkan produk barang hijau berbahan dasar dari kawasan hutan perlu mendapat perhatian.

Untuk menuju pengelolaan hutan berdasarkan *forest resource and total ecosystem management* (hutan dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan integral dari suatu ekosistem), maka diperlukan pula tata aturan yang mengatur, baik yang bersifat pemantapan aturan yang sudah ada maupun pembuatan yang baru. Demikian pula halnya dengan kelembagaan terutama kelembagaan yang mendorong peran aktif masyarakat lokal agar manfaat produksi/ekonomi, ekologi dan sosial budaya dapat dirasakan keadilannya baik oleh masyarakat maupun negara dan yang tidak kalah pentingnya adalah tersedia informasi data yang akurat, komunikatif, dan transparan. Informasi ini baik yang menyangkut potensi hutan: biofisik, ekonomi dan sosial budaya maupun informasi yang menyangkut kebijakan lokal, nasional maupun global.

TABEL 4.24
DATA PEMILIKAN LAHAN HUTAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PEMILIKAN LAHAN	LUAS
1	2	3
1	Milik Negara	ha
2	Milik adat/Ulayat	ha
3	Perhutani/instansi sektoral	ha
4	Milik masyarakat perorangan	ha

	TOTAL LUAS HUTAN	ha
--	-------------------------	-----------

TABEL 4.25
DATA HASIL HUTAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS HASIL HUTAN	JUMLAH
1	2	3
1	Kayu	- M ³ /th
2	Madu lebah	- Liter/th
3	Rotan	- Ton/th
4	Damar	- Ton/th
5	Bambu	- M ³ /th
6	Jati	- M ³ /th
7	Nilam	- Ton/th
8	Lontar	- Ton/th
9	Sagu	- Ton/th
10	Enau	- Ton/th
11	Mahoni	- M ³ /th
12	Cemara	- M ³ /th
13	Kayu cendana	- Ton/th
14	Kayu gaharu	- Ton/th
15	Sarang burung	- Ton/th
16	Meranti	- M ³ /th
17	Kayu besi	- M ³ /th
18	Kayu ulin	- M ³ /th
19	Kemenyan	- Ton/th
20	Gambir	- Ton/th
21	Minyak kayu putih	- Ton/th
22	Gula enau	- Ton/th
23	Gula lontar	- Ton/th
24	Arang	- Ton/th

TABEL 4.26
DATA KONDISI HUTAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	KONDISI HUTAN	BAIK	RUSAK	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Hutan Bakau/Mangrove	- ha	- ha	- ha
2	Hutan Produksi	- ha	- ha	- ha
3	Hutan Lindung	ha	- ha	ha
4	Hutan Suaka Margasatwa	- ha	- ha	- ha
5	Hutan Suaka Alam	- ha	- ha	- ha
6	Hutan Rakyat	ha	Ha	ha

TABEL 4.27
DATA DAMPAK DARI PENGOLAHAN HUTAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	DAMPAK YANG TIMBUL	RINCIAN
1	2	3
1	Pencemaran Udara	Tidak
2	Pencemaran Air	Tidak
3	Longsor/Erosi	Tidak
4	Bising	Tidak
5	Kerusakan biota/plasmanuftah hutan	Tidak
6	Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka	Ada
7	Hilangnya sumber mata air	Tidak
8	Kebakaran hutan	Tidak
9	Terjadinya kekeringan/sulit air	Tidak
10	Berubahnya fungsi hutan	Tidak
11	Terjadinya lahan kritis	Tidak
12	Hilangnya daerah tangkapan air (<i>cacthment area</i>)	Tidak
13	Musnahnya habitat binatang hutan	Tidak

TABEL 4.28
DATA PEMASARAN HASIL HUTAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PEMASARAN	RINCIAN
1	2	3
1	Dijual langsung ke konsumen	Tidak
2	Dijual ke pasar	Tidak
3	Dijual melalui KUD	Tidak
4	Dijual melalui tengkulak	Tidak
5	Dijual melalui pengecer	Tidak
6	Dijual ke lumbung kelurahan	Tidak
7	Tidak dijual	Tidak

5) **Peternakan**

TABEL 4.29
DATA POPULASI TERNAK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS TERNAK	JUMLAH PEMILIK	PERKIRAAN JUMLAH POPULASI
1	2	3	4
1	Sapi	- orang	- ekor
2	Kerbau	- orang	- ekor
3	Babi	- orang	- ekor
4	Ayam kampung	- orang	- ekor
5	Jenis ayam broiler	- orang	- ekor
6	Bebek	- orang	- ekor
7	Kuda	- orang	- ekor
8	Kambing	- orang	- Ekor
9	Domba	- orang	- ekor
10	Angsa	- orang	- ekor
11	Burung puyuh	- orang	- ekor
12	Kelinci	- orang	- Ekor
13	Burung walet	- orang	- Ekor

14	Anjing	- orang	- ekor
15	Kucing	- orang	- ekor
	TOTAL	orang	- ekor

TABEL 4.30
DATA PRODUKSI TERNAK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRODUKSI	JUMLAH
1	2	3
1	Susu	- Kg/th
2	Kulit	- M/th
3	Telur	- Kg/th
4	Daging	- Kg/th
5	Madu	- Lt/th
6	Bulu	- Kg/th
7	Air liur burung walet	- Kg/th
8	Minyak	- Lt/th
9	Hiasan/lukisan	- Unit/th
10	Cinderamata	- Unit/th

TABEL 4.31
DATA KETERSEDIAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PAKAN TERNAK	JUMLAH
1	2	3
1	Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll)	- ha
2	Produksi hijauan makanan ternak	- Ton/ha
3	Luas lahan gembalaan	- ha
4	Dipasok dari luar kelurahan	- ton
5	Disubsidi dinas	- ton

TABEL 4.32
DATA PEMILIK USAHA PENGOLAHAN HASIL TERNAK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PENGOLAHAN HASIL	JUMLAH PEMILIK
1	2	3
1	Dendeng	- orang
2	Abon	- orang
3	Penyamakan kulit	- orang
4	Madu lebah	- orang
5	Biogas	- orang
6	Telur asin	- orang
7	Krupuk kulit	- orang
8	Penyemakan kulit	- orang
9	Kerajinan tangan (<i>handy craft</i>)	- orang
	TOTAL PEMILIK USAHA	- orang

TABEL 4.33
DATA PEMASARAN HASIL TERNAK
KELURAHAN SAGATANI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

NO	JENIS PEMASARAN	RINCIAN
1	2	3
1	Dijual langsung ke konsumen	Tidak
2	Dijual ke pasar hewan	Tidak
3	Dijual melalui KUD	Tidak
4	Dijual melalui tengkulak	Tidak
5	Dijual melalui pengecer	Tidak
6	Dijual ke lumbung kelurahan	Tidak
7	Tidak dijual	Tidak

TABEL 4.34
DATA LAHAN PEMELIHARAAN TERNAK/PADANG PENGEMBALAAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS LAHAN PEMELIHARAAN	LUAS
1	2	3
1	Milik masyarakat umum	- ha
2	Milik perusahaan peternakan (ranch)	- ha
3	Milik perorangan	- ha
4	Sewa pakai	- ha
5	Milik pemerintah	- ha
6	Milik masyarakat adat	- ha
	TOTAL LAHAN	- ha

6) Perikanan

Sejalan dengan proses desentralisasi pembangunan yang di dalamnya terkandung tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan Pendekatan pengembangan wilayah perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunari daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumberdaya dan sumberdana pembangunan di daerah.

Dalam rangka itu pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan potensial yang salah satunya diidentifikasi sebagai kawasan sentra produksi perlu dilakukan secara intensif sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi milenium ketiga, bangsa Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi ekonomi sebagian besar anggota masyarakat masih sangat memprihatinkan. Sementara itu tantangan terbesar yang juga harus diantisipasi adalah kesiapan masyarakat dalam memasuki era perdagangan bebas dan globalisasi. Terjadinya krisis dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok, seperti beras, ikan, minyak dan lainnya, merupakan salah satu wujud dari dampak perdagangan bebas yang sekaligus menjadi indikasi kurang-siapannya masyarakat dalam menghadapinya.

Krisis “komoditas ikan” beberapa waktu yang lalu dapat berdampak pada gairah petani/masyarakat untuk memproduksi ikan, sehingga pendapatan riil masyarakat menurun dan pada akhirnya juga akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang menurun. Akibat lanjutannya adalah banyak tenaga kerja pedesaan yang kehilangan kesempatan kerja, yang apabila dibiarkan akan memunculkan kerawanan sosial.

Salah satu potensi masyarakat yang belum secara optimal didaya-gunakan adalah lembaga-lembaga sosial-tradisional yang telah mengakar di masyarakat, seperti Koperasi Primer Ikan Rakyat (KOPINKAN) di wilayah sentra produksi ikan, yang didukung oleh Pusat Koperasi Ikan Rakyat di Dati II dan Propinsi, Serta Induk Koperasi ikan Rakyat di tingkat Nasional.

Pada saat ini terdapat banyak KOPINKAN dengan berbagai skala usaha dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Beberapa perihal penting yang dihadapi KOPINKAN saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan koperasi ikan rakyat dan petani ikan rakyat. Hal ini mengakibatkan lemahnya “*bargaining power*” koperasi dalam bertransaksi dengan Pabrik Ikan.
2. Masih terlalu banyaknya kebijakan pemerintah yang ikut mengendalikan “agroindustri ikan rakyat” sehingga mengakibatkan berbagai bentuk distorsi yang merugikan petani ikan.
3. Lemahnya dukungan permodalan dari lembaga keuangan formal/sistem perbankan kepada KOPINKAN.
4. Masih adanya kebijakan distribusi/tata niaga ikan yang berdampak negatif kepada petani ikan.

TABEL 4.35
DATA JENIS DAN ALAT PRODUKSI
BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS BUDIDAYA	JUMLAH	HASIL
1	2	3	4
1	Karamba	- unit	- Ton/th
2	Tambak	- ha	- Ton/th
3	Jermal	- unit	- Ton/th
4	Pancing	- unit	- Ton/th
5	Pukat	- unit	- Ton/th
6	Jala	- unit	- Ton/th
	TOTAL	-	- Ton/th

TABEL 4.36
DATA JENIS DAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS BUDIDAYA	JUMLAH	HASIL
1	2	3	4
1	Karamba	- unit	- Ton/th
2	Empang/kolam	- ha/m ²	- Ton/th
3	Danau	- ha/m ²	- Ton/th
4	Rawa	- ha/m ²	- Ton/th
5	Sungai	- ha/m ²	- Ton/th

6	Sawah	- ha/m ²	- Ton/th
7	Jala	- unit	- Ton/th
8	Pancingan	- unit	- Ton/th
	TOTAL	-	- Ton/th

Oleh karena itu, lembaga KOPINKAN milik masyarakat ini perlu segera lebih diberdayakan dengan **pertimbangan rasional** sebagai berikut:

1. Lembaga KOPINKAN (dengan segala fasilitasnya) yang sudah tersebar di sentra produksi merupakan infrastruktur yang sudah tersedia sebagai sarana dalam rangka mengembangkan aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sehingga pemerintah tidak memerlukan program dan biaya untuk membangun sarana fisik yang baru dalam upaya mengatasi krisis ikan.
2. Sebagian besar penduduk pedesaan sentra produksi ikan Kabupaten Malang merupakan kelompok-kelompok tani produktif dengan basis pertanian ikan rakyat sebagai usahanya. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan pada umumnya telah membina rasa kebersamaan untuk mengatasi masalah mereka. Sehingga dengan pilihan program-program terobosan yang tepat sasaran dan tepat guna dapat mempercepat gerak roda perekonomian di tingkat bawah (*grass-roots*).
3. Dengan pilihan program pemberdayaan yang tepat, fungsi KOPINKAN dapat ditingkatkan dari sebatas "simpan pinjam" menjadi pusat kegiatan perekonomian (*center of economic activities*) masyarakat di sekitarnya. Peningkatan peranan ini sekaligus membuka peluang bagi para tenaga terampil terdidik (ex tenaga kerja yang PHK) untuk diperan-sertakan dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Dengan demikian, tenaga terampil terdidik diberdayakan untuk berperan dalam pengembangan kewira-usahaan dan kegiatan-kegiatan agroindustri ikan rakyat bersama masyarakat.
4. Pada sebagian KOPINKAN juga telah tumbuh dan berkembang unit usaha WASERDA yang melayani saprodi dan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Selain itu juga telah berkembang unit usaha "Lembaga Keuangan" khusus bagi kelompok petani ikan. Sebagai lembaga keuangan alternatif keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, terutama untuk memerangi praktek para rentenir.
5. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk membangun sistem produksi ikan dan jaringan distribusi ikan dalam rangka menghindari kelangkaan akibat ulah para spekulan menimbun barang, maka keberadaan KOPINKAN dapat diberdayakan sebagai pengelola KIPKANMAS.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang sangat urgen dan relevan untuk diupayakan Program "Pemberdayaan KOPINKAN sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat yang Mengakar dan Mandiri, serta layak mengelola KIPKANMAS".

Program seperti ini merupakan salah satu bentuk investasi masyarakat yang berkelanjutan melalui POLA MODAL KOPINKAN diharapkan dapat menimbulkan efek rambatan pada tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat sesuai dengan potensi ekonomis di wilayah sekitarnya.

Sasaran pemberdayaan selanjutnya adalah agar dapat memperluas dan meningkatkan nilai tambah (*value added*) dan kesempatan kerja (*employment generation*) di berbagai sektor riil lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan agro-industri ikan rakyat.

TABEL 4.39
DATA JENIS IKAN DAN PRODUKSI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS IKAN	HASIL PRODUKSI
1	2	3
1	Tuna	- ton/th
2	Salmon	- ton/th
3	Tongkol/cakalang	- ton/th
4	Hiu	- ton/th
5	Kakap	- ton/th
6	Tenggiri	- ton/th
7	Jambal	- ton/th
8	Pari	- ton/th
9	Kuwe	- ton/th
10	Belanak	- ton/th
11	Cumi	- ton/th
12	Gurita	- ton/th
13	Sarden	- ton/th
14	Bawal	- ton/th
15	Baronang	- ton/th
16	Kembung	- ton/th
17	Ikan ekor kuning	- ton/th
18	Kerapu/sunuk	- ton/th
19	Teripang	- ton/th
20	Bara-bara	- ton/th
21	Cucut	- ton/th
22	Layur	- ton/th
23	Ayam-ayam	- ton/th
24	Udang/lobster	- ton/th
25	Tembang	- ton/th
26	Bandeng	- ton/th

27	Nener	-	ton/th
28	Kerang	-	ton/th
29	Kepiting	-	ton/th
30	Mas	-	ton/th
31	Rajungan	-	ton/th
32	Mujair	-	ton/th
33	Lele	-	ton/th
34	Gabus	-	ton/th
35	Patin	-	ton/th
36	Nila	-	ton/th
37	Sepat	-	ton/th
38	Gurame	-	ton/th
39	Pelut	-	ton/th
40	Penyu	-	ton/th
41	Rumput laut	-	ton/th
42	Kodok	-	ton/th
43	Katak	-	ton/th
44	Bawal Air Tawar	-	ton/th
	TOTAL HASIL PRODUKSI	-	ton/th

TABEL 4.38
DATA PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PEMASARAN	RINCIAN
1	2	3
1	Dijual langsung ke konsumen	Tidak
2	Dijual ke pasar	Tidak
3	Dijual melalui KUD	Tidak
4	Dijual melalui tengkulak	Tidak
5	Dijual melalui pengecer	Tidak
6	Dijual ke lumbung kelurahan	Tidak
7	Tidak dijual	Tidak

7) **Bahan Galian**

Wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat tidak mempunyai bahan galian yang menjadi mata pencaharian warga Kelurahan Tengah dalam kehidupan sehari-hari.

TABEL 4.39
DATA JENIS DAN DEPOSIT BAHAN GALIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS GALIAN	KEBERADAAN
1	2	3
1	Batu kali	Tidak
2	Batu gunung	Tidak
3	Batu kapur	Tidak
4	Pasir	Tidak
5	Emas	Tidak
6	Nikel	Tidak
7	Belerang	Tidak
8	Batu marmer	Tidak
9	Batu cadas	Tidak
10	Batu apung	Tidak
11	Pasir kwarsa	Tidak
12	Batubara	Tidak
13	Batu granit	Tidak
14	Batu gamping	Tidak
15	Mangan	Tidak
16	Batu trass	Tidak
17	Batu putih	Tidak
18	Pasir batu	Tidak
19	Pasir besi	Tidak
20	Batu gips	Tidak
21	Minyak bumi	Tidak
22	Gas alam	Tidak
23	Kulit kerang	Tidak

24	Timah	Tidak
25	Tanah garam	Tidak
26	Biji besi	Tidak
27	Uranium	Tidak
28	Bouxit	Tidak
29	Tanah liat	Tidak

TABEL 4.40
DATA PRODUKSI BAHAN GALIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRODUKSI BAHAN GALIAN	SKALA
1	2	3
1	Batu kapur	Tidak Ada
2	Pasir	Tidak Ada
3	Emas	Tidak Ada
4	Kuningan	Tidak Ada
5	Alumunium	Tidak Ada
6	Perunggu	Tidak Ada
7	Belerang	Tidak Ada
8	Batu marmer	Tidak Ada
9	Batu cadas	Tidak Ada
10	Batu apung	Tidak Ada
11	Pasir kwarsa	Tidak Ada
12	Batubara	Tidak Ada
13	Batu granit	Tidak Ada
14	Batu gamping	Tidak Ada
15	Mangan	Tidak Ada
16	Batu trass	Tidak Ada
17	Batu putih	Tidak Ada
18	Pasir batu	Tidak Ada
19	Pasir besi	Tidak Ada

20	Gips	Tidak Ada
21	Minyak bumi	Tidak Ada
22	Gas alam	Tidak Ada
23	Perak	Tidak Ada
24	Timah	Tidak Ada
25	Garam	Tidak Ada
26	Tembaga	Tidak Ada
27	Biji besi	Tidak Ada
28	Uranium	Tidak Ada
29	Bouxit	Tidak Ada
30	Nikel	Tidak Ada

TABEL 4.41
DATA PRODUKSI BAHAN GALIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS DAN PRODUKSI BAHAN GALIAN	PENGELOLA/PEMILIK
1	2	3
1	Batu kapur	Tidak Ada
2	Pasir	Tidak Ada
3	Emas	Tidak Ada
4	Kuningan	Tidak Ada
5	Alumunium	Tidak Ada
6	Perunggu	Tidak Ada
7	Belarang	Tidak Ada
8	Batu marmer	Tidak Ada
9	Batu cadas	Tidak Ada
10	Batu apung	Tidak Ada
11	Pasir kwarsa	Tidak Ada
12	Batubara	Tidak Ada
13	Batu granit	Tidak Ada

14	Batu gamping	Tidak Ada
15	Mangan	Tidak Ada
16	Batu trass	Tidak Ada
17	Batu putih	Tidak Ada
18	Pasir batu	Tidak Ada
19	Pasir besi	Tidak Ada
20	Gips	Tidak Ada
21	Minyak bumi	Tidak Ada
22	Gas alam	Tidak Ada
23	Perak	Tidak Ada
24	Timah	Tidak Ada
25	Garam	Tidak Ada
26	Tembaga	Tidak Ada
27	Biji besi	Tidak Ada
28	Batu kali	Tidak Ada
29	Bouxit	Tidak Ada
30	Nikel	Tidak Ada

TABEL 4.42
DATA PEMASARAN HASIL GALIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PEMASARAN	RINCIAN
1	2	3
1	Dijual langsung ke konsumen	Tidak
2	Dijual ke pasar	Tidak
3	Dijual melalui KUD	Tidak
4	Dijual melalui tengkulak	Tidak
5	Dijual melalui pengecer	Tidak
6	Dijual ke perusahaan	Tidak
7	Dijual ke lumbung kelurahan	Tidak
8	Tidak dijual	Tidak

8) Sumber Daya Air

Sumberdaya air merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang pemanfaatannya diusahakan secara bijaksana agar kebutuhan dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Potensi sumberdaya air suatu wilayah adalah salah satu faktor penting di dalam menunjang kehidupan manusia. Salah satu upaya dalam pengelolaan sumberdaya air adalah mengetahui potensi, laju eksploitasi, pemanfaatan dan penyebarannya.

Sumberdaya air merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang pemanfaatannya diusahakan secara bijaksana agar kebutuhan dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Potensi sumberdaya air suatu wilayah adalah salah satu faktor penting di dalam menunjang kehidupan manusia. Ketersediaan air sangat mutlak di dalam memenuhi kebutuhan untuk domestik, industri maupun pertanian.

Sejalan dengan perkembangan suatu kota maka kebutuhan penyediaan air juga akan meningkat sehingga perlu dilakukan kajian potensi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air di masa mendatang. Kajian potensi sumber daya air secara berkala dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengevaluasi cadangan, pemanfaatan dan degradasi sumberdaya air.

Dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Kegiatan pembuangan limbah cair oleh kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian.

Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut Baku Mutu Limbah Cair.

Baku mutu air pada sumber air, disingkat **baku mutu air**, adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, naun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

Baku mutu udara ambien adalah bataskadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda.

Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien.

Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus adan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.

TABEL 4.43
DATA POTENSI AIR DAN SUMBER DAYA AIR
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS POTENSI	KONDISI
1	2	3
1	Sungai	Debit : sedang
2	Danau	Tidak Ada
3	Mata air	Debit : sedang
4	Bendungan/waduk/situ	Tidak Ada
5	Embung-embung	Tidak Ada
6	Jebakan air	Tidak Ada

TABEL 4.44
DATA SUMBER AIR BERSIH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUMBER AIR BERSIH	JUMLAH	PEMANFAAT	KONDISI
1	2	3	4	5
1	Mata air	150 unit	80 KK	Baik
2	Sumur gali	- unit	- KK	-
3	Sumur pompa	- unit	- -KK	-
4	Hidran umum	- unit	- -KK	-
5	PAM	10 unit	520 KK	Baik
6	Pipa	- unit	- KK	Baik
7	Sungai	- unit	- KK	Baik
8	Embung	- unit	- KK	-
9	Bak penampung air hujan	7 unit	25 KK	-
10	Beli dari tangki swasta	Unit	- KK	Baik
11	Depot isi ulang	- unit	- KK	-
12	Sumber lain	- unit	- KK	-

TABEL 4.45
DATA KUALITAS SUMBER AIR MINUM
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUMBER AIR MINUM	KONDISI
1	2	3
1	Mata air	Baik
2	Sumur gali	Tidak Ada
3	Sumur pompa	Tidak Ada
4	Hidran umum	Tidak Ada
5	PAM	Baik
6	Pipa	Baik
7	Sungai	Baik
8	Embung	Tidak Ada
9	Bak penampung air hujan	Ada
10	Beli dari tangki swasta	Baik
11	Depot isi ulang	Tidak Ada
12	Sumber lain	Tidak Ada

TABEL 4.46
DATA JUMLAH DAN KONDISI SUNGAI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	KONDISI SUNGAI	KEBERADAAN
1	2	3
1	Jumlah sungai	1 buah
2	Tercemar	Ya
3	Pendangkalan/pengendapan lumpur tinggi	Tidak
4	Keruh	Ya
5	Jernih dan tidak tercemar/memenuhi baku mutu air	Tidak
6	Berkurangnya biota sungai	Tidak
7	Kering	Tidak

TABEL 4.47
DATA LUAS DAN PEMANFAATAN RAWA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PEMANFATAAN RAWA	KEBERADAAN
1	2	3
1	Luas rawa	ha
2	Perikanan darat maupun laut	Tidak
3	Air baku untuk pengolahan air minum	Tidak
4	Cuci dan mandi	Tidak
5	Irigasi	Tidak
6	Buang air besar	Tidak
7	Perikanan	Tidak
8	Sayuran	Tidak
9	Pembudidayaan hutan mangrove	Tidak

TABEL 4.48
DATA LUAS, PEMANFAATAN DAN KONDISI DANAU/WADUK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	DANAU/WADUK/SITU	KEBERADAAN
1	2	3
1	Luas danau	ha
PEMANFATAAN		
1	Perikanan	Tidak
2	Air minum/air baku	Tidak
3	Cuci dan mandi	Tidak
4	Irigasi	Tidak
5	Buang air besar	Tidak
6	Pembangkit listrik	Tidak
7	Prasarana transportasi	Tidak
8	Lainnya	Tidak

KONDISI		
1	Tercemar	Tidak
2	Pendangkalan	Tidak
3	Keruh	Tidak
4	Berlumpur	Tidak

9) Kualitas lingkungan

Untuk menilai keadaan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat telah dipilih 4 (empat) indikator yaitu :

- persentase keluarga yang memiliki akses air bersih;
- presentase rumah sehat;
- keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar; dan
- Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TPUM).

Beberapa upaya untuk memperkecil resiko turunnya kualitas lingkungan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait, swasta, NGO dan lain-lain seperti pembangunan sarana sanitasi dasar, pemantauan dan penataan lingkungan, pengukuran dan pengendalian kualitas lingkungan. Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat yang berkaitan langsung dengan masalah kesehatan meliputi penyediaan air bersih, jamban sehat, perumahan sehat yang biasanya ditangani secara lintas sektor.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, maka kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya :

- 1) Mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan **daya dukung dan daya tampungnya**;
- 2) menegakkan hukum secara adil dan konsisten **untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan**;
- 3) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;
- 4) **memberdayakan masyarakat** dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
- 5) menerapkan secara efektif penggunaan **indikator-indikator** untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 6) memelihara **kawasan konservasi** yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan
- 7) mengikutsertakan masyarakat dalam rangka **menanggulangi** permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan **baku mutu lingkungan** yang ditetapkan,

serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

10) Ruang Publik/Taman

Wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan memiliki taman alam yang secara alami dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Singkawang umumnya dan warga Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat khususnya.

Taman (ruang publik) ini dapat digunakan oleh warga sebagai tempat berkumpul bersama keluarga maupun pelaksanaan acara ibadah maupun acara keluarga.

Taman yang berada di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan antara lain

TABEL 4.49
DATA RUANG PUBLIK/TAMAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	TAMAN/RUANG PUBLIK	ALAMAT	KET
1	2	3	4
1.	TAMAN BURUNG		

11) Wisata

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

Lokawisata, tempat wisata atau obyek wisata adalah sebuah tempat rekreasi/tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah dan lain-lain.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangandan pengalaman baru dan berbeda lainnya.

TABEL 4.50
DATA POTENSI WISATA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	LOKASI WISATA	KEBERADAAN	LUAS	TINGKAT PEMANFAATAN
1	2	3	4	5
1	Laut (Wisata pulau, taman laut, situs, sejarah bahari, pantai, dll)	Tidak Ada	- ha	Pasif
2	Danau (Wisata air, hutan wisata, situs, purbakala, dll)	Tidak Ada	- ha	Pasif
3	Gunung (Wisata hutan, taman nasional, bumi perkemahan, dll)	Tidak Ada	- Ha	Pasif
4	Agrowisata	Tidak Ada	- ha	Pasif
5	Hutan khusus	Tidak Ada	Ha	Aktif
6	Goa	Tidak Ada	- ha	Pasif
7	Cagar budaya	Tidak Ada	- ha	Pasif
8	Arung jeram	Tidak Ada	- ha	Pasif
9	Situs sejarah dan museum	Tidak Ada	- ha	Pasif
10	Air terjun	Tidak Ada	- Ha	Pasif
11	Padang savana	Tidak Ada	- ha	Pasif

Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan *pariwisata* adalah *berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah*.

Wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan yang berada pada perbukitan pegunungan memberi potensi wisata yang baik bagi Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan. Ada beberapa tempat wisata alam di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan yang telah dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai tempat wisata umum guna dinikmati masyarakat banyak.

NO	TEMPAT WISATA	ALAMAT	KET
1	2	3	4

NO	RT	KK	KELOMPOK UMUR				
			0-5	6-16	17-59	60 dst	Jumlah
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH		687	149	492	1.008	180	1929

c. PENDIDIKAN

TABEL 4.54
DATA PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2021

NO	RT	KK	PENDIDIKAN										JUMLAH
			B. SEKOLAH	T. TMT SD	SD	SMP	SMA	DI-II	DIII	S1	S2-S3	B. HURUF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	001	81	17	28	49	77	59	-	15	33	-	-	281
2	002	107	29	74	139	56	32	5	-	24	-	-	353
3	003	72	23	15	41	23	89	-	22	26	3	-	242
4	004	87	18	66	30	36	114	2	11	25	-	-	302
5	005	183	61	108	92	129	177	5	11	35	1	-	619
6	006	68	34	59	17	12	79	2	3	2	-	-	208
7	007	89	10	33	43	79	142	-	1	10	-	-	318
JUMLAH		687	192	383	411	412	692	14	60	157	4	-	2.323

d. PEKERJAAN

TABEL 4.55
DATA PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2021

NO	RT	KK	PEKERJAAN								JUMLAH
			B BEKERJA	PELAJAR	PNS	POLRI	TNI	PETANI	WIRA SWASTA	RUMAH TANGGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	001	81	65	45	17	-	4	-	102	48	281
2	002	107	30	71	8	-	-	-	173	71	353
3	003	72	42	28	3	1	2	-	108	58	242
4	004	87	19	39	18	1	-	-	158	67	302
5	005	183	122	140	28	3	2	4	202	118	619
6	006	68	28	14	22	-	5	2	84	53	208
7	007	89	20	103	21	3	-	-	110	61	318
JUMLAH		687	326	440	117	8	9	6	937	476	2.323

e. AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN

TABEL 4.56
DATA PENDUDUK MENURUT AGAMA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2021

No	RT	KK	AGAMA						Jumlah
			Islam	Kristen	Katholik	Budha	Hindu	KHC	
1	001	81	281	-	-	-	-	-	281
2	002	107	353	-	-	-	-	-	353
3	003	72	236	6	-	-	-	-	242
4	004	87	292	10	-	-	-	-	302
5	005	183	500	12	-	101	-	6	619
6	006	68	169	10	5	24	-	-	208
7	007	89	281	-	5	29	-	3	318
JUMLAH		687	2112	38	10	154	-	9	2.323

f. KEWARGANEGARAAN

TABEL 4.57
DATA PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2021

NO	RT	WNI	WNA	DWI STATUS
1	2	3	4	5
1	01	281	-	-
2	02	353	-	-
3	03	242	-	-
4	04	302	-	-
5	05	619	-	-
6	06	208	-	-
7	07	318	-	-
JUMLAH		2.323	-	-

g. ETNIS/SUKU BANGSA

TABEL 4.58
DATA PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA PER RT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN 2019

NO	RT	KK	KELOMPOK SUKU BANGSA					JUMLAH
			DAYAK	MELAYU	JAWA	TIONGHOA	LAIN2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	001	83	-	242	24	-	15	281
2	002	79	-	300	53	-	-	353
3	003	58	-	198	44	-	-	242
4	004	82	-	244	51	-	7	302
5	005	87	-	574	-	32	10	619
6	006	111	-	129	47	21	14	208
7	007	81	-	244	32	17	25	318
JUMLAH		848	-	1.931	251	70	71	2.323

h. CACAT FISIK DAN MENTAL

TABEL 4.59
DATA PENDUDUK MENURUT CACAT FISIK PER RT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	RT	TUNA WISMA	TUNA RUNGU	TUNA WICARA	TUNA NETRA	TUNA DAKSA
1	2	3	4	5	6	7
1	01	-	-	-	-	-
2	02	-	-	-	-	-
3	03	-	-	-	-	-
4	04	-	-	-	-	-
5	05	-	-	-	-	-
6	06	-	-	-	-	-
7	07	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-

TABEL 4.61
DATA PENDUDUK MENURUT CACAT FISIK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS CACAT FISIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4
1	Tuna rungu	- orang	- orang
2	Tuna wicara	orang	orang
3	Tuna netra	- orang	- orang
4	Lumpuh	- orang	- orang
5	Sumbing	- orang	- orang
6	Cacat kulit	- orang	- orang
7	Cacat fisik/tuna daksa lainnya	- orang	orang
	JUMLAH	orang	orang

TABEL 4.62
DATA PENDUDUK MENURUT CACAT MENTAL
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	JENIS CACAT FISIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4
1	Idiot	- orang	- orang
2	Gila	- orang	- orang
3	Stress	- orang	- orang
4	Autis	- orang	- orang
	JUMLAH	- orang	- orang

TABEL 4.63
DATA PENDUDUK MENURUT CACAT MENTAL PER RT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	RT	IDIOT	GILA	STRESS	AUTIS
1	2	3	4	5	6
1	01	-	-	-	-
2	02	-	-	-	-
3	03	-	-	-	-

4	04	-	-	-	-
5	05	-	-	-	-
6	06	-	-	-	-
7	07	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

4.3 DATA SUMBER DAYA KELEMBAGAAN

a. LEMBAGA PEMERINTAHAN KELURAHAN

TABEL 4.64
DATA LEMBAGA PEMERINTAHAN
KELURAHAN SAGATANI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

No	LEMBAGA PEMERINTAHAN	KEBERADAAN	KETERANGAN KONDISI
1	2	3	4
1	Dasar hukum pembentukan Pemerintah Kelurahan	Ada	Perda
2	Dasar hukum pembentukan BPD	Tidak	Tidak Ada
3	Jumlah aparat pemerintahan Kelurahan	9	orang
4	Jumlah perangkat kelurahan	4	Unit kerja
5	Lurah	Ada	Aktif
6	Sekretaris Kelurahan	Ada	Aktif
7	Kepala Urusan Pemerintahan	Ada	Aktif
8	Kepala Urusan Pembangunan	Ada	Aktif
9	Kepala Urusan PM-Kessos	Ada	Aktif
10	Kepala Urusan Umum	Tidak	Aktif
11	Kepala Urusan Keuangan	Tidak	Aktif
12	Kepala Urusan Pengelolaan Barang	Ada	Aktif
13	Jumlah staf	4	orang
14	Jumlah RT di lingkungan Kelurahan	7	RT
15	Ketua RT 01	Ada	Aktif
16	Ketua RT 02	Ada	Aktif
17	Ketua RT 03	Ada	Aktif

18	Ketua RT 04	Ada	Aktif
19	Ketua RT 05	Ada	Aktif
20	Ketua RT 06	Ada	Aktif
21	Ketua RT 07	Ada	Aktif

TABEL 4.65
DATA TINGKAT PENDIDIKAN APARAT KELURAHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	APARAT KELURAHAN	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	PASCA SARJANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lurah					√	
2	Sekretaris				√		
3	Kepala urusan pemerintahan			√			
4	Kepala urusan Ekonomi pembangunan					√	
5	Kepala urusan PM-Kessos					√	

TABEL 4.66
DATA JUMLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	ANGGOTA BPD	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	PASCA SARJANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keberadaan BPD	Tidak					
2	Jumlah anggota BPD	-					
	PENDIDIKAN ANGGOTA BPD						
1	Ketua	-	-	-	-	-	-
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-
3	Sekretaris	-	-	-	-	-	-
4	Anggota	-	-	-	-	-	-
5	Anggota	-	-	-	-	-	-
6	Anggota	-	-	-	-	-	-
7	Anggota	-	-	-	-	-	-

b. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas **mempunyai fungsi**:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- Lembaga Adat;
- Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- RT/RW;
- Karang Taruna; dan
- Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Adapun data keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tengah Tahun 2017 dapat dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.69
DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	LKK	KEBERADAAN	KETERANGAN KONDISI
1	2	3	4
1	Keberadaan LKK	Ada	Aktif
2	Dasar hukum pembentukan	Bila belum ada organisasi LKK	
		Bila pembentukan LKK berdasarkan Perda Kota	
		Berdasarkan Keputusan Walikota	
		Berdasarkan Keputusan Camat	
		Tidak/belum ada dasar hukum	
3	Jumlah pengurus	orang	
4	Alamat kantor	-	
5	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu	
LKMD / LKMK			
1	2	3	
1	Dasar hukum pembentukan		
2	Jumlah pengurus	orang	
3	Alamat kantor		
4	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu	
LPMD / LPMK ATAU SEBUTAN LAIN			
1	2	3	

1	Dasar hukum pembentukan	
2	Jumlah pengurus	Orang
3	Alamat kantor	
4	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
PKK		
1	2	3
1	Dasar hukum pembentukan	SK Lurah Tengah
2	Jumlah pengurus	24 Orang
3	Alamat kantor	Jl.Tengah
4	Ruang lingkup kegiatan	5 Jenis, yaitu Sekretariat PKK dan 4 Pokja
RUKUN TETANGGA (RT)		
1	2	3
1	Jumlah RT	7 unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	SK Lurah Tengah
3	Jumlah pengurus	7 orang
4	Alamat kantor	Masing-masing wilayah RT
5	Ruang lingkup kegiatan	2 Jenis, yaitu Administrasi dan Kependudukan
KARANGTARUNA		
1	2	3
1	Dasar hukum pembentukan	--
2	Jumlah pengurus	-- orang
3	Alamat kantor	--
4	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
KELOMPOK TANI / NELAYAN		
1	2	3
1	Jumlah	unit organisasi

2	Dasar hukum pembentukan	
3	Jumlah pengurus	Orang
4	Alamat kantor	
5	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
LEMBAGA ADAT		
1	2	3
1	Jumlah	1 unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	
3	Jumlah pengurus	Orang
4	Alamat kantor	
5	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
BADAN USAHA MILIK DESA		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--
5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
ORGANISASI KEAGAMAAN		
1	2	3
1	Jumlah	unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	
3	Jumlah pengurus	Orang
4	Alamat kantor	
5	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN		

1	2	3
1	Jumlah	1 unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	
3	Jumlah pengurus	Orang
4	Alamat kantor	
5	Ruang lingkup kegiatan	1 Jenis, yaitu Pertanian
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--
5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
ORGANISASI PROFESI LAINNYA		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--
5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
ORGANISASI BAPAK		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--

5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
KELOMPOK GOTONG ROYONG		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--
5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
P W I		
1	2	3
1	Dasar hukum pembentukan	--
2	Jumlah pengurus	-- orang
3	Alamat kantor	--
4	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
I D I		
1	2	3
1	Dasar hukum pembentukan	--
2	Jumlah pengurus	-- orang
3	Alamat kantor	--
4	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
P A R I ' I		
1	2	3
1	Dasar hukum pembentukan	--
2	Jumlah pengurus	-- orang
3	Alamat kantor	--
4	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
PECINTA ALAM		

1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--
5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
WREDATAMA		
1	2	3
1	Dasar hukum pembentukan	--
2	Jumlah pengurus	-- orang
3	Alamat kantor	--
4	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
KELOMPOK PEMIRSA		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--
5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
PANTI		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	--
3	Jumlah pengurus	-- orang
4	Alamat kantor	--
5	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --

YAYASAN		
1	2	3
1	Jumlah	unit organisasi
2	Dasar hukum pembentukan	
3	Jumlah pengurus	Orang
4	Alamat kantor	
5	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
LEMBAGA		
1	2	3
1	Dasar hukum pembentukan	
2	Jumlah pengurus	Orang
3	Alamat kantor	
4	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas **mempunyai fungsi**:

- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

2. Tim Penggerak PKK Kelurahan

Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas **mempunyai fungsi**:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Tim Penggerak PKK Kelurahan Tengah Kec. Singkawang Barat telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai tugas pokok dan masing-masing program kerja kelompok untuk mencapai tujuan pelaksanaan organisasi PKK Kelurahan Tengah. Tim Penggerak PKK Kelurahan Tengah yang terdiri atas kader-kader yang merupakan bagian dari masyarakat Kelurahan Sagatani dibentuk melalui Ketetapan Keputusan Lurah Tengah tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Tengah Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.

Adapun susunan pengurus TP.PKK Kelurahan Tengah Kec. Singkawang Barat yaitu:

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT**

KETUA TP PKK	:	NUR'AINI
WAKIL KETUA I	:	RAHMA DAHRNI
WAKIL KETUA II	:	-
BENDAHARA	:	NUR APNI
SEKRETARIS I	:	NUNUK SUGIARTI
SEKRETARIS II	:	-

KELOMPOK KERJA I

KETUA : HJ. RUSMINAH
SEKRETARIS : EMA ERMAWATI
ANGGOTA : 1. AISYAH
2. DEWI HANDAYANI
3. METTY MARIA

KELOMPOK KERJA II

KETUA : SRI WIJAYATI
SEKRETARIS : AGUS RINIYANTI
ANGGOTA : 1. VINA SUNDARI
2. DAHLIA
3. SITI ZALEHA

KELOMPOK KERJA III

KETUA : TITIK MURYATI
SEKRETARIS : ENY HARSIH
ANGGOTA : 1. RODIAMAH
2. ANITA RENI
3. SRI HARTINI

KELOMPOK KERJA IV

KETUA : RITA INDRIANI, A.MD.KEB
SEKRETARIS : URAY DESNAWATI
ANGGOTA : 1. NOVIA KUSUMA W
2. TYA PRIHARTANTI
3. SAULATIAH



3. RT/RW

RT/RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RT/RW dalam melaksanakan tugas **mempunyai fungsi**:

- pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

4. Karang Taruna

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna dalam melaksanakan tugas **mempunyai fungsi**:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

5. Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

c. LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Fungsi lembaga sosial adalah untuk memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok, menjaga keutuhan dari masyarakat, sebagai paduan masyarakat dalam mengawasi tingkah laku anggotanya.

Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah *social institution*, namun *social institution* juga diterjemahkan sebagai **pranata sosial**. Hal ini dikarenakan *social institution* merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggotamasyarakat.

Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Istilah lain yang digunakan adalah bangunan sosial yang diambil dari bahasa Jerman *sozialegebilde* dimana menggambarkan dan susunan institusi tersebut.

Perkembangan Lembaga Sosial

Terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar.

Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial sekumpulan norma mengalami proses yang panjang.

Proses tersebut dinamakan pelebagaan atau *institutionalized*, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi. Dengan kata lain, pelebagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalam kehidupan bersama.

Syarat Norma Terlembaga

Suatu norma terlembaga (*institutionalized*) apabila memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut.
3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.

Dikenal 4 (empat) tingkatan norma dalam proses pelebagaan, **pertama** cara (*usage*) yang menunjuk pada suatu perbuatan. **Kedua**, kemudian carabertingkah laku berlanjut dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan (*folkways*), yaitu perbuatan yang selalu diulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu. **Ketiga**, apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. **Keempat**, tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya.

Tata kelakuan semacam ini disebut adat istiadat (*custom*). Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi yang lebih keras. Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika norma-norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan tetapi menjadi terpatir dalam diri secara sukarela (*internalized*) dimana masyarakat dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Lembaga sosial umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk

suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau *institutionalization* menghasilkan lembaga sosial.

Ciri dan Karakter

Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali. Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial sebagai berikut:

1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
3. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain.
4. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
5. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
6. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

Terdapat **9 (sembilan) ciri khas (karakteristik) lembaga sosial** sebagai berikut:

1. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
2. Setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
3. Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.
4. Ada saling ketergantungan antar lembaga sosial di masyarakat, perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain.
5. Meskipun antar lembaga sosial saling bergantung, masing-masing lembaga sosial disusun dan diorganisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan.
6. Ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi.
7. Suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku.
8. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.
9. Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

Syarat Lembaga Sosial

Aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut.
3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.
5. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

d. ORGANISASI PROFESI

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan.

Secara umum ada 3 ciri yang disetujui oleh banyak penulis sebagai ciri sebuah profesi. Adapun ciri itu ialah:

1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Pelatihan ini dimulai sesudah seseorang memperoleh gelar sarjana. Sebagai contoh mereka yang telah lulus sarjana baru mengikuti pendidikan profesi seperti dokter, dokter gigi, psikologi, apoteker, farmasi, arsitektur untuk Indonesia. Di berbagai negara, pengacara diwajibkan menempuh ujian profesi sebelum memasuki profesi.
2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Pelatihan tukang batu, tukang cukur, pengrajin meliputi ketrampilan fisik. Pelatihan akuntan, engineer, dokter meliputi komponen intelektual dan ketrampilan. Walaupun pada pelatihan dokter atau dokter gigi mencakup ketrampilan fisik tetap saja komponen intelektual yang dominan. Komponen intelektual merupakan karakteristik profesional yang bertugas utama memberikan nasehat dan bantuan menyangkut bidang keahliannya yang rata-rata tidak diketahui atau dipahami orang awam. Jadi memberikan konsultasi bukannya memberikan barang merupakan ciri profesi.
3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Dengan kata lain profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Dokter, pengacara, guru, pustakawan, engineer, arsitek memberikan jasa yang penting agar masyarakat dapat berfungsi; hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang pakar permainan catur misalnya. Bertambahnya jumlah profesi dan profesional pada abad 20 terjadi karena ciri tersebut. Untuk dapat berfungsi maka masyarakat modern yang secara teknologis kompleks memerlukan aplikasi yang lebih besar akan pengetahuan khusus

daripada masyarakat sederhana yang hidup pada abad-abad lampau. Produksi dan distribusi energi memerlukan aktivitas oleh banyak engineers. Berjalannya pasar uang dan modal memerlukan tenaga akuntan, analis sekuritas, pengacara, konsultan bisnis dan keuangan. Singkatnya profesi memberikan jasa penting yang memerlukan pelatihan intelektual yang ekstensif.

Di samping ketiga syarat itu ciri profesi berikutnya. Ketiga ciri tambahan tersebut tidak berlaku bagi semua profesi. Adapun ketiga ciri tambahan tersebut ialah:

4. Adanya proses lisensi atau sertifikat. Ciri ini lazim pada banyak profesi namun tidak selalu perlu untuk status profesional. Dokter diwajibkan memiliki sertifikat praktek sebelum diizinkan berpraktek. Namun pemberian lisensi atau sertifikat tidak selalu menjadikan sebuah pekerjaan menjadi profesi. Untuk mengemudi motor atau mobil semuanya harus memiliki lisensi, dikenal dengan nama surat izin mengemudi. Namun memiliki SIM tidak berarti menjadikan pemiliknya seorang pengemudi profesional. Banyak profesi tidak mengharuskan adanya lisensi resmi. Dosen di perguruan tinggi tidak diwajibkan memiliki lisensi atau akta namun mereka diwajibkan memiliki syarat pendidikan, misalnya sedikit-dikitnya bergelar magister atau yang lebih tinggi. Banyak akuntan bukanlah *Certified Public Accountant* dan ilmuwan komputer tidak memiliki lisensi atau sertifikat.
5. Adanya organisasi. Hampir semua profesi memiliki organisasi yang mengklaim mewakili anggotanya. Ada kalanya organisasi tidak selalu terbuka bagi anggota sebuah profesi dan seringkali ada organisasi tandingan. Organisasi profesi bertujuan memajukan profesi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan anggotanya akan berarti organisasi profesi terlibat dalam mengamankan kepentingan ekonomis anggotanya. Sungguhpun demikian organisasi profesi semacam itu biasanya berbeda dengan serikat kerja yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada kepentingan ekonomi anggotanya. Maka hadirin tidak akan menjumpai organisasi pekerja tekstil atau bengkel yang berdemo menuntut disain mobil yang lebih aman atau konstruksi pabrik yang terdisain dengan baik.
6. Otonomi dalam pekerjaannya. Profesi memiliki otonomi atas penyediaan jasanya. Di berbagai profesi, seseorang harus memiliki sertifikat yang sah sebelum mulai bekerja. Mencoba bekerja tanpa profesional atau menjadi profesional bagi diri sendiri dapat menyebabkan ketidakberhasilan. Bila pembaca mencoba menjadi dokter untuk diri sendiri maka hal tersebut tidak sepenuhnya akan berhasil karena tidak dapat menggunakan dan mengakses obat-obatan dan teknologi yang paling berguna. Banyak obat hanya dapat diperoleh melalui resep dokter.

Adapun **peran organisasi profesi** yaitu sebagai berikut:

1. Pembina, pengembang dan pengawas terhadap mutu pendidikan keperawatan
2. Pembina, pengembang dan pengawas terhadap pelayanan keperawatan
3. Pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan
4. Pembina, pengembang dan pengawas kehidupan profesi

Fungsi organisasi profesi yaitu sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan keperawatan
 - a. Menetapkan standar pendidikan keperawatan
 - b. Mengembangkan pendidikan keperawatan berjenjang lanjut

2. Bidang pelayanan keperawatan
 - a. Menetapkan standar profesi keperawatan
 - b. Memberikan izin praktik
 - c. Memberikan registrasi tenaga keperawatan
 - d. Menyusun dan memberlakukan kode etik keperawatan
3. Bidang IPTEK
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi riset keperawatan
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi perkembangan IPTEK dalam keperawatan
4. Bidang kehidupan profesi
 - a. Membina, mengawasi organisasi profesi
 - b. Membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain dan antar anggota
 - c. Membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis dengan negara lain
 - d. Membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota

Manfaat organisasi profesi antara lain:

1. Mengembangkan dan memajukan profesi
2. Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi
3. Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi
4. Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi

e. Partai Politik

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah pemerintahan Kota Singkawang yang termasuk dalam bagian wilayah Pemilihan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 yang lalu. Di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan tidak terdapat Kantor Cabang dari Partai Politik yang ada di Negara ini. Namun dari beberapa Anggota DPRD Kota Singkawang ada warga Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat yang menjabat sebagai wakil rakyat yang duduk di keanggotaan DPRD Kota Singkawang.

TABEL 4.67
DATA LEMBAGA POLITIK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3
PARTAI GOLKAR		
1	Jumlah pengurus	Orang
2	Jumlah partai politik Lokal	
3	Jumlah partai politik Nasional	
4	Jumlah anggota	Orang
5	Jumlah pemilih pada pemilu terakhir	Orang
6	Alamat Sekretariat/Kantor	
7	Dasar hukum pembentukan	

8	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
9	Organisasi underbow	
PARTAI PDIP		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	1 Orang
2	Jumlah anggota	Orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	Orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	
5	Dasar hukum pembentukan	
6	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
7	Organisasi underbow	
PARTAI PPP		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	Orang
2	Jumlah anggota	Orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	Orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	
5	Dasar hukum pembentukan	
6	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
7	Organisasi underbow	
PARTAI DEMOKRAT		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	Orang
2	Jumlah anggota	Orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	Orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	
5	Dasar hukum pembentukan	
6	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
7	Organisasi underbow	
PARTAI PAN		
1	2	3

1	Jumlah pengurus	Orang
2	Jumlah anggota	Orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	Orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	
5	Dasar hukum pembentukan	
6	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
7	Organisasi underbow	
PARTAI PKS		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	-- orang
2	Jumlah anggota	-- orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--
5	Dasar hukum pembentukan	--
6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
7	Organisasi underbow	--
PARTAI BERKARYA		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	-- orang
2	Jumlah anggota	-- orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--
5	Dasar hukum pembentukan	--
6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
7	Organisasi underbow	--
PARTAI PKB		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	-- orang
2	Jumlah anggota	-- orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--

5	Dasar hukum pembentukan	--
6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
7	Organisasi underbow	--
PARTAI PND		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	-- orang
2	Jumlah anggota	-- orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--
5	Dasar hukum pembentukan	--
6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
7	Organisasi underbow	--
PARTAI GPI		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	-- orang
2	Jumlah anggota	-- orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--
5	Dasar hukum pembentukan	--
6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
7	Organisasi underbow	--
PARTAI PSI		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	-- orang
2	Jumlah anggota	-- orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--
5	Dasar hukum pembentukan	--
6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
7	Organisasi underbow	--
PARTAI HANURA		
1	2	3

1	Jumlah pengurus	Orang
2	Jumlah anggota	Orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	Orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	
5	Dasar hukum pembentukan	
6	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
7	Organisasi underbow	
PARTAI GERINDRA		
1	2	3
1	Jumlah pengurus	Orang
2	Jumlah anggota	Orang
3	Jumlah pemilih pada PEMILU TERAKHIR	Orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	
5	Dasar hukum pembentukan	
6	Ruang lingkup kegiatan	Jenis, yaitu
7	Organisasi underbow	
ORGANISASI UNDERBOW PARTAI		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Jumlah pengurus	-- orang
3	Jumlah anggota	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--
5	Dasar hukum pembentukan	--
6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
ORGANISASI UNDERBOW PARTAI		
1	2	3
1	Jumlah	-- unit organisasi
2	Jumlah pengurus	-- orang
3	Jumlah anggota	-- orang
4	Alamat Sekretariat/Kantor	--
5	Dasar hukum pembentukan	--

6	Ruang lingkup kegiatan	-- Jenis, yaitu --
---	------------------------	--------------------

f. LEMBAGA PEREKONOMIAN

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat memiliki Kelembagaan Perekonomian Pedesaan guna meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kota Singkawang.

Kelembagaan Perekonomian Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat dapat dilihat pada tabel pada halaman berikut.

TABEL 4.68
DATA LEMBAGA EKONOMI DAN UNIT USAHA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	LEMBAGA EKONOMI DAN UNIT USAHA	JUMLAH (unit)	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA
1	2	3	4	5
1	Koperasi Unit Desa	--	--	--
2	Koperasi Simpan Pinjam	--	--	--
3	Kelompok Simpan Pinjam	--	--	--
4	Bumdes	--	--	--
	JUMLAH	--	--	--

TABEL 4.69
DATA JASA LEMBAGA KEUANGAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	LEMBAGA EKONOMI DAN UNIT USAHA	JUMLAH (unit)	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PENGURUS
1	2	3	4	5
1	Jasa Asuransi	--	--	--
2	Lembaga Keuangan Non Bank	--	--	--
3	Bank Perkreditan Rakyat	--	--	--
4	Pegadaian	--	--	--
5	Bank Pemerintah	1	--	--
	JUMLAH	--	--	--

TABEL 4.70
DATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	JUMLAH (unit)	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PENGURUS
1	2	3	4	5
1	Industri makanan	--	--	--
2	Industri alat rumah tangga	--	--	--
3	Industri masterial bahan bangunan	--	--	--
4	Industri alat pertanian	--	--	--
5	Industri kerajinan	--	--	--
6	Rumah makan dan restoran			
	JUMLAH			

TABEL 4.71
DATA USAHA JASA PENGANGKUTAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	USAHA JASA PENGANGKUTAN	JUMLAH PEMILIK	KAPASITAS	TENAGA KERJA
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan	1 orang	10 orang	1 orang
2	Angkutan Antar Kota/Propinsi	-- orang	-- orang	-- orang
ANGKUTAN SUNGAI				
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilik perahu motor/klotok atau sejenisnya	-- orang	-- orang	-- orang
2	Jumlah pemilik Jet Boat	-- orang	-- orang	-- orang
3	Jumlah angkutan Jet Boat	-- orang	-- orang	-- orang
4	Jumlah pemilik angkutan penumpang sungai dengan kapasitas lebih dari 10 orang	-- orang	-- orang	-- orang
5	Jumlah angkutan sungai yang kapasitas kurang dari 10 kursi	-- unit		
6	Jumlah angkutan sungai yang kapasitas antara 10-100	-- unit		
7	Jumlah angkutan sungai yang kapasitas 100-500	-- unit		

ANGKUTAN LAUT				
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilik Jet Boat	-- orang	-- orang	-- orang
2	Jumlah pemilik perahu jenis ferry/kapal penumpang	-- orang	-- orang	-- orang
3	Jet Foil	-- orang	-- orang	-- orang
ANGKUTAN UDARA				
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilik pesawat jenis ringan/helikopter	-- orang	-- orang	-- orang
EKSPEDISI DAN PENGIRIMAN				
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilik Usaha Jasa Ekspedisi/Pengiriman barang	-- orang	-- orang	-- orang

TABEL 4.72
DATA USAHA JASA DAN PERDAGANGAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	USAHA JASA DAN PERDAGANGAN	JUMLAH	JENIS PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN	TENAGA KERJA
1	2	3	4	5
1	Pasar Hasil Bumi/Tradisional/Harian	-- unit	-- jenis	-- orang
2	Pasar Mingguan	-- unit	-- jenis	-- orang
3	Pasar Bulanan	-- unit	-- jenis	-- orang
4	Pasar Kaget/Pasar Khusus	-- unit	-- jenis	-- orang
5	Jumlah usaha Toko/Kios	unit	Jenis	orang
6	Swalayan	-- unit	-- jenis	-- orang
7	Warung Serba Ada	unit	Jenis	orang
8	Toko Kelontong	unit	Jenis	orang
9	Usaha peternakan	unit	Jenis	orang
10	Usaha perikanan	unit	Jenis	orang
11	Usaha perkebunan	unit	Jenis	orang
12	Usaha minuman (kemasan, dll)	-- unit	-- jenis	-- orang

13	Industri Farmasi	-- unit	-- jenis	-- orang
14	Industri Caroseri/Cat mobil	-- unit	-- jenis	-- orang
15	Industri Penyamakan Kulit	-- unit	-- jenis	-- orang
16	Penitipan kendaraan bermotor	-- unit	-- jenis	-- orang
17	Industri perakitan elektronik	-- unit	-- jenis	-- orang
18	Pengolahan kayu	unit	Jenis	orang
	JUMLAH	unit	Jenis	orang

TABEL 4.73
DATA USAHA JASA HIBURAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	USAHA JASA HIBURAN	JUMLAH	JENIS PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN	TENAGA KERJA
1	2	3	4	5
1	Bioskop	-- unit	-- jenis	-- orang
2	Film Keliling	-- unit	-- jenis	-- orang
3	Sandiwara/drama	-- unit	-- jenis	-- orang
4	Group lawak	-- unit	-- jenis	-- orang
5	Sirkus keliling/Topeng monyet/Ondel-ondel, dll	-- unit	-- jenis	-- orang
6	Wayang orang/Wayang Golek	-- unit	-- jenis	-- orang
7	Group musik/band	-- unit	-- jenis	-- orang
8	Group vokal/paduan suara	-- unit	-- jenis	-- orang
	JUMLAH	-- unit	-- jenis	-- orang

TABEL 4.74
DATA USAHA JASA GAS, LISTRIK, BBM DAN AIR
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	USAHA JASA GAS, LISTRIK, BBM DAN AIR	JUMLAH	JENIS PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN	TENAGA KERJA
1	2	3	4	5
1	Usaha penyewaan tenaga listrik	-- unit	-- jenis	-- orang
2	SPBU	-- unit	-- jenis	-- orang
3	Pangkalan minyak tanah	-- unit	-- jenis	-- orang

4	Pengecer Gas dan bahan bakar	unit	Jenis	orang
5	Usaha air minum kemasan/isi ulang	-- unit	-- jenis	-- orang
	JUMLAH	unit	Jenis	orang

TABEL 4.75
DATA USAHA JASA KETERAMPILAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	USAHA JASA KETERAMPILAN	JUMLAH	JENIS PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN	TENAGA KERJA
1	2	3	4	5
1	Tukang Kayu	unit	Jenis	orang
2	Tukang Batu	unit	Jenis	orang
3	Tukang Jahit/Bordir	unit	Jenis	orang
4	Tukang Cukur	unit	Jenis	orang
5	Tukang Service Elektronik	unit	Jenis	orang
6	Tukang Besi	unit	Jenis	orang
7	Tukang Gali Sumur	unit	Jenis	orang
8	Tukang Pijat/Urut/Pengobatan	unit	Jenis	orang
	JUMLAH	unit	Jenis	orang

TABEL 4.76
DATA USAHA JASA HUKUM DAN KONSULTANSI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	USAHA JASA KETERAMPILAN	JUMLAH	JENIS PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN	TENAGA KERJA
1	2	3	4	5
1	Notaris	-- unit	-- jenis	-- orang
2	Pengacara/Advokat	-- unit	-- jenis	-- orang
3	Konsultan Manajemen	-- unit	-- jenis	-- orang
4	Konsultan Teknis	-- unit	-- jenis	-- orang
5	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	-- unit	-- jenis	-- orang

	JUMLAH	-- unit	-- jenis	-- orang
--	---------------	---------	----------	----------

TABEL 4.77
DATA USAHA JASA PENGINAPAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	USAHA JASA KETERAMPILAN	JUMLAH	JENIS PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN	TENAGA KERJA
1	2	3	4	5
1	Losmen	-- unit	-- jenis	-- orang
2	Wisma	-- unit	-- jenis	-- orang
3	Asrama	-- unit	-- jenis	-- orang
4	Persewaan kamar	-- unit	-- jenis	-- orang
5	Kontrakan rumah	-- unit	-- jenis	-- orang
6	Mess	-- unit	-- jenis	-- orang
7	Hotel	-- unit	-- jenis	-- orang
8	Home Stay	-- unit	-- jenis	-- orang
9	Villa	-- unit	-- jenis	-- orang
10	Town House	-- unit	-- jenis	-- orang
	JUMLAH	-- unit	-- jenis	-- orang

g. Lembaga Pendidikan

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat belum memiliki data Lembaga Pendidikan baik milik Negeri (Negara) maupun swasta.

TABEL 4.78
DATA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	NAMA	JUMLAH	STATUS (terdaftar/ terakreditasi)	KEPEMILIKAN			JML TENAGA PENGAJAR	JML SISWA
				PEM	SWASTA	KELUR AHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Play Group	-						
2	TK	1			√			
3	SD/ sederajat	2		√	√			
4	SMP/ sederajat	-						
5	SMA/ sederajat	-						
6	PTN	-						
7	PTS	1			√			
8	SLB	-						
	JUMLAH	4		1	3			

h. LEMBAGA ADAT

Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersama dengan pertumbuhan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Menurut **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007** tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga

Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, menjelaskan bahwa **Lembaga adat adalah** organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya.

Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Lembaga Adat berkedudukan sebagai mitra pemerintah daerah yang merupakan forum permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat dan atau Pemangku Adat dan atau Ketua Adat dan atau Pemuka-pemuka adat pada satuan masyarakat hukum diluar susunan organisasi pemerintah.

Lembaga Adat mempunyai **tugas** yaitu:

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan.

Lembaga Adat **berfungsi** bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas mempunyai **fungsi** sebagai berikut:

1. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, Sat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
2. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
3. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Lembaga adat mempunyai **wewenang** yang meliputi :

1. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut;
2. Mengelola hak-hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Lembaga adat **berkewajiban** untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan atau pembinaan kemasyarakatan terutama yang menyangkut pemanfaatan hak-hak adat dan atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum ada setempat;
2. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis; dan
3. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat memiliki data Lembaga Adat di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan yang dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.79
DATA LEMBAGA ADAT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	LEMBAGA ADAT	KEBERADAAN
1	2	3
1	Pemangku Adat	Ada
2	Kepengurusan Adat	Ada
SIMBOL ADAT		
1	Rumah Adat	Tidak
2	Barang Pusaka	Ada
3	Naskah-naskah	Tidak
JENIS KEGIATAN ADAT		
1	Musyawarah Adat	Ada
2	Sanksi Adat	Ada
3	Upacara Adat Perkawinan	Ada
4	Upacara Adat Kematian	Ada
5	Upacara Adat Kelahiran	Ada
6	Upacara Adat dalam bercocok tanam	Ada
7	Upacara Adat bidang perikanan/laut	Tidak

8	Upacara Adat bidang kehutanan	Ada
9	Upacara Adat dalam pengelolaan sumber daya alam	Ada
10	Upacara Adat dalam pembangunan rumah	Ada
11	Upacara Adat dalam penyelesaian masalah/konflik	Ada

i. LEMBAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan memiliki keanggotaan Hansip untuk penanganan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Sagatani. Dalam suatu acara atau keramaian di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan, anggota Hansip dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya penciptaan suasana yang efektif demi peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat.

Adapun data Lembaga Keamanan Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat adalah sebagai berikut :

TABEL 4.80
DATA LEMBAGA KEAMANAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	LEMBAGA KEAMANAN	KETERANGAN KONDISI
1	2	3
HANSIP DAN LINMAS		
1	Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada
2	Jumlah anggota Hansip	-- orang
3	Jumlah anggota Satgas Linmas	orang
4	Pelaksanaan SISKAMLING	Tidak
5	Jumlah Pos Kamling	-- buah
SATPAM SWAKARSA		
1	2	3
1	Keberadaan SATPAM SWAKARSA	Tidak
2	Jumlah anggota	-- orang
3	Nama organisasi induk/pemilik	--
4	Keberadaan organisasi keamanan lainnya	Tidak
KERJASAMA KELURAHAN DENGAN TNI-POLRI DALAM BIDANG TRANTIBLINMAS		
1	2	3
1	Mitra Koramil/TNI	Ada
2	Jumlah anggota	2 orang

3	Jumlah kegiatan	1	jenis
4	Babinkamtibmas/POLRI	Ada	
5	Jumlah anggota	1	orang
6	Jumlah kegiatan	1	jenis

4.4 DATA PRASARANA DAN SARANA

a. Transportasi

Ketersediaan kendaraan untuk transportasi di wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat dapat dilihat dari data tabel dibawah ini :

TABEL 4.81
DATA PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	BAIK (km atau unit)	RUSAK (km atau unit)
1	2	3	
1. JALAN KELURAHAN			
1	Panjang jalan aspal		
2	Panjang jalan makadam		
3	Panjang jalan tanah		
4	Panjang jalan sirtu		
5	Panjang jalan koblok/semen/beton		
2. JALAN ANTAR KELURAHAN/KECAMATAN			
1	Panjang jalan aspal		
2	Panjang jalan makadam		
3	Panjang jalan tanah		
4	Panjang jalan sirtu		
5	Panjang jalan koblok/semen/beton		
3. JALAN KABUPATEN YANG MELEWATI KELURAHAN			
1	Panjang jalan aspal		
2	Panjang jalan makadam		
3	Panjang jalan tanah		

4	Panjang jalan sirtu		
5	Panjang jalan koblok/semen/beton		
4. JALAN PROPINSI YANG MELEWATI KELURAHAN			
1	Panjang jalan aspal		
2	Panjang jalan makadam		
3	Panjang jalan tanah		
4	Panjang jalan sirtu		
5	Panjang jalan koblok/semen/beton		
5. PANJANG JALAN NEGARA			
1	Panjang jalan aspal		
2	Panjang jalan makadam		
3	Panjang jalan tanah		
4	Panjang jalan sirtu		
5	Panjang jalan koblok/semen/beton		
6. JEMBATAN KELURAHAN			
1	Jumlah jembatan beton		
2	Jumlah jembatan besi		
3	Jumlah jembatan kayu		
7. PRASARANA ANGKUTAN DARAT			
1	Jumlah pangkalan ojek		
2	Jumlah stasiun Kereta Api		
3	Terminal bis/angkutan perkotaan		
TOTAL			

TABEL 4.82
DATA SARANA TRANSPORTASI DARAT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS SARANA	KEBERADAAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Bus Umum	Ada	Unit

2	Truck Umum	Ada	Unit
3	Angkutan per-Kelurahan	Ada	Unit
4	Ojek	Tidak	-- unit
5	Delman/bendi/cidomo	Tidak	-- unit
6	Becak	Tidak	-- unit
7	Kereta Api	Tidak	-- unit
TOTAL			Unit

TABEL 4.83
DATA PRASARANA TRANSPORTASI LAUT/SUNGAI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah tambatan perahu	-- unit
2	Jumlah pelabuhan kapal penumpang	-- unit
3	Jumlah pelabuhan kapal barang	-- unit
TOTAL		-- unit

TABEL 4.84
DATA SARANA TRANSPORTASI SUNGAI/LAUT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS SARANA	KEBERADAAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Perahu motor	Tidak	-- unit
2	Kapal antar pulau	Tidak	-- unit
3	Perahu tanpa motor	Tidak	-- unit
4	Jet Boat	Tidak	-- unit
5	Kapal Pesiar	Tidak	-- unit
TOTAL		--	-- unit

TABEL 4.85
DATA PRASARANA TRANSPORTASI UDARA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS SARANA	KEBERADAAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Lapangan terbang nasional/internasional	Tidak	-- unit
2	Lapangan terbang perintis	Tidak	-- unit
3	Lapangan terbang domestik	Tidak	-- unit
4	Halipad	Tidak	-- unit
5	Lapangan terbang komersial	Tidak	-- unit
TOTAL		--	-- unit

b. Informasi dan Komunikasi

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat merupakan kawasan yang cukup berkembang baik dari segi informasi dan komunikasi. Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan memiliki banyak jumlah rumah tangga yang telah menggunakan telepon rumah ataupun handphone sebagai alat komunikasi sehari-hari masyarakat.

TABEL 4.86
DATA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	KEBERADAAN	JUMLAH
1	2	3	
1. TELEPON			
1	Telepon umum	Tidak	Unit
2	Wartel	Tidak	-- unit
3	Warnet	Tidak	Unit
4	Jumlah Pelanggan Telkom	Orang	
5	Jumlah Pelanggan GSM	Orang	
6	Jumlah Pelanggan CDMA	Orang	
7	Sinyal Telepon Seluler/Handphone	Ada	
2. KANTOR POS			

1	Kantor pos	Tidak	-- unit
2	Kantor Pos Pembantu	Tidak	-- unit
3	Tukang Pos	--	orang
3. Radio/TV			
1	TV Umum	Ada	
2	Jumlah Radio	Ada	
3	Jumlah TV	Unit	
4	Jumlah parabola	Unit	
4. Koran/Majalah/Buletin			
1	Koran/surat kabar	Tidak	
2	Majalah	Tidak	
3	Papan iklan/reklame	Ada	
4	Papan pengumuman	Ada	

c. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat memiliki data prasarana Air bersih dan Sanitasi di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan.

TABEL 4.87
DATA PRASARANA AIR BERSIH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah sumur pompa	Unit
2	Jumlah sumur gali	Unit
3	Jumlah hidran umum	Unit
4	Jumlah PAH	Unit
5	Jumlah tangki air bersih	Unit
6	Jumlah embung	Unit
7	Jumlah mata air	Unit

8	Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum	Unit
TOTAL		Unit

TABEL 4.88
DATA PRASARANA SANITASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Ada / Tidak
2	Sumur resapan air rumah tangga	Rumah
3	Jumlah MCK Umum	Unit
4	Jumlah pemilik jamban keluarga	KK
5	Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	

d. Prasarana dan Kondisi Irigasi

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat belum memiliki data prasarana dan kondisi Irigasi di wilayah Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat.

TABEL 4.89
DATA PRASARANA IRIGASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Panjang saluran primer	M
2	Panjang saluran sekunder	M
3	Panjang saluran tersier	M
4	Jumlah pintu sadap	Unit
5	Jumlah pintu pembagi air	Unit

TABEL 4.90
DATA KONDISI PRASARANA IRIGASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Panjang saluran primer rusak	M
2	Panjang saluran sekunder rusak	M
3	Panjang saluran tersier rusak	M
4	Jumlah pintu sadap rusak	Unit
5	Jumlah pintu pembagi air rusak	Unit

e. Prasarana dan Sarana Pemerintahan

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat merupakan Kelurahan yang memiliki gedung kantor yang berada di kawasan Kelurahan itu sendiri. Adapun prasarana dan sarana Pemerintahan di Kantor Lurah Tengah yang beralamat di Jalan Tengah NO. 28 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

Berbagai sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Lurah Tengah dapat dalam Kartu Inventrisasi Ruang pada halaman berikut :

TABEL 4.91
DATA SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1. GEDUNG KANTOR		
1	Kondisi	M
2	Jumlah ruang kerja	5 M
3	Balai Kelurahan	1 M
4	Listrik	1 unit
5	Air bersih	1 unit
6	Telepon	- unit
7	Rumah Dinas Lurah	-- unit
8	Rumah Dinas Perangkat Kelurahan	-- unit

2. INVENTARIS DAN ALAT TULIS KANTOR			
1	Jumlah mesin tik	-	unit
2	Jumlah meja	13	unit
3	Jumlah almari arsip	5	unit
4	Komputer	5	unit
5	Mesin fax	--	unit
6	Kendaraan dinas	1	unit

TABEL 4.92
DATA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS ADMINISTRASI	KEBERADAAN	KONDISI
1	2	3	4
1	Buku Data Peraturan Kelurahan	Ada	Terisi
2	Buku Keputusan Lurah	Ada	Terisi
3	Buku Administrasi Kependudukan	Ada	Terisi
4	Buku Data Inventaris	Ada	Terisi
5	Buku Data Aparat	Ada	Terisi
6	Buku Data Tanah Milik Kelurahan/Tanah Kas Kelurahan atau milik Kelurahan	Ada	Terisi
7	Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Ada	Terisi
8	Buku Data Tanah	Ada	Terisi
9	Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada	Terisi
10	Buku Agenda Ekspedisi	Ada	Terisi
11	Buku Profil Kelurahan	Ada	Terisi
12	Buku Data Induk Penduduk	Ada	Terisi
13	Buku-buku data mutasi penduduk	Ada	Terisi
14	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan	Ada	Terisi
15	Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada	Terisi
16	Buku Data Penduduk Sementara	Ada	Terisi
17	Buku Anggaran Penerimaan	Ada	Terisi
18	Buku Anggaran Pengeluaran, Pegawai dan Pembangunan	Ada	Terisi

19	Buku Kas Umum	Ada	Terisi
20	Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada	Terisi
21	Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin dan Pembangunan	Ada	Terisi
22	Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada	Terisi
TOTAL		22	Unit

TABEL 4.93
DATA PRASARANA DAN SARANA BPD
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRASARANA DAN SARANA	KEBERADAAN
1	2	3
1	Gedung kantor	Tidak
2	Ruangan kerja	Tidak
3	Balai BPD	Tidak
	KONDISI	--
1	Listrik	Tidak
2	Telepon	Tidak
	INVENTARIS DAN ALAT TULIS KANTOR	
1	Jumlah mesin tin	-- buah
2	Jumlah meja	-- buah
3	Jumlah kursi	-- buah
4	Komputer	-- unit
5	Mesin fax	-- unit
	ADMINISTRASI BPD	
1	Buku-buku administrasi keanggotaan BPD	Tidak
2	Buku administrasi kegiatan BPD	-- jenis
3	Buku kegiatan BPD	Tidak
4	Buku himpunan Peraturan Desa yang ditetapkan BPD dan Kepala Desa	Tidak

TABEL 4.93
DATA PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRASARANA DAN SARANA	KEBERADAAN
1	2	3
1	Gedung kantor atau Balai Pertemuan	Tidak
2	Alat tulis kantor	Tidak
3	Barang inventaris	Tidak
4	Buku Administrasi	-- jenis
5	Buku Administrasi	Tidak
6	Jenis kegiatan	-- jenis
7	Jumlah pengurus	-- orang

f. Prasarana dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat belum memiliki data prasarana dan sarana Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan.

TABEL 4.94
DATA PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRASARANA DAN SARANA	KEBERADAAN
1	2	3
	GEDUNG/KANTOR LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	
1	Peralatan kantor: komputer, fax	Ada
2	Mesin tik	Ada
3	Kardek	Ada/Tidak
4	Buku administrasi Lembaga Kemasyarakatan	jenis
5	Jumlah meja dan kursi	unit
	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)	
1	Memiliki kantor sendiri	Tidak
2	Peralatan kantor: komputer, fax	Tidak
3	Mesin tik	Tidak

4	Kardek	Tidak
5	Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	jenis
6	Jumlah meja dan kursi	unit
7	Buku administrasi	jenis
8	Jumlah kegiatan	jenis
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	
1	Gedung/kantor	Ada
2	Peralatan kantor/ATK/inventaris	Ada
3	Kepengurusan	Ada
4	Kepengurusan	Aktif
5	Buku administrasi PKK	Ada
6	Buku administrasi PKK	8 jenis
7	Kegiatan	Ada
8	Jumlah kegiatan	5 jenis
	KARANG TARUNA	
1	Kepengurusan	Tidak
2	Buku administrasi	Tidak
3	Buku administrasi	-- jenis
4	Jumlah kegiatan	-- jenis
	RUKUN TETANGGA (RT)	
1	Kepengurusan	Aktif
2	Buku administrasi	Ada
3	Buku administrasi	2 jenis
4	Jumlah kegiatan	2 jenis

	RUKUN WARGA (RW)	
1	Kepengurusan	Tidak
2	Buku administrasi	Tidak
3	Buku administrasi	-- jenis
4	Jumlah kegiatan	-- jenis
	LEMBAGA ADAT	
1	Memiliki kantor/gedung/menumpang	Aktif/
2	Kepengurusan	Aktif/
3	Buku administrasi	Ada
4	Buku administrasi	1 jenis
5	Jumlah kegiatan	1 jenis
	BUMDES	
1	Memiliki kantor/gedung/menumpang	Tidak
2	Kepengurusan	Tidak
3	Buku administrasi	Tidak
4	Buku administrasi	-- jenis
5	Jumlah kegiatan	-- jenis
	FORUM KOMUNIKASI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1	Memiliki kantor/gedung/menumpang	Aktif/Tidak
2	Kepengurusan	Aktif/Tidak
3	Buku administrasi	Ada/Tidak
4	Buku administrasi	jenis
5	Jumlah kegiatan	jenis
	KANTOR/GEDUNG ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN LAINNYA	
1	Kepengurusan	/Tidak
2	Buku administrasi	Tidak

3	Buku administrasi	-- jenis
4	Jumlah kegiatan	-- jenis
	KANTOR/GEDUNG ORGANISASI PROFESI YANG ADA	
1	Kepengurusan	Tidak
2	Buku administrasi	Tidak
3	Buku administrasi	-- jenis
4	Jumlah kegiatan	-- jenis

g. Prasarana Peribadatan

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat memiliki tempat peribadatan dari beberapa agama dan kepercayaan antara lain sebagai berikut :

TABEL 4.95
DATA TEMPAT PERIBADATAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

No	NAMA TEMPAT IBADAH	ALAMAT
1	2	3
1	MASJID JAMI' ATTAQWA	JL. PEMBANGUNAN
2	SURAU AL-MUKHLISIN	JL. TENGAH
3	SURAU NURUL IKHSAN	JL. TENGAH
4		
5		

TABEL 4.96
DATA PRASARANA PERIBADATAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRASARANA PERIBADATAN	KEBERADAAN
1	2	3
1	Jumlah Masjid	1 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	2 buah

3	Jumlah Gereja Kristen Protestan	buah
4	Jumlah Gereja Katholik	buah
5	Jumlah Vihara	buah
6	Jumlah Pura	-- buah
7	Jumlah Klenteng	buah

h. Prasarana Olah Raga

Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat memiliki prasarana dan sarana olahraga di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan.

TABEL 4.97
DATA PRASARANA OLAHRAGA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRASARANA OLAHRAGA	KEBERADAAN
1	2	3
1	Lapangan sepak bola	-- buah
2	Lapangan bulu tangkis	-- buah
3	Lapangan Futsal	1 buah
4	Lapangan tenis	-- buah
5	Lapangan voli	1 buah
6	Lapangan golf	-- buah
7	Pacuan kuda	-- buah
8	Arum jeram	Tidak
9	Lapangan basket	-- buah
10	Pusat kebugaran	-- buah
11	Gelanggang remaja	Tidak

i. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Komponen lain di dalam sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersediaan sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi lingkungan. Pembangunan sarana kesehatan harus dilengkapi dengan peralatan medis, peralatan nonmedis, peralatan laboratorium beserta reagensia, alat pengolah data kesehatan, peralatan komunikasi, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu Puskesmas Pembantu (PUSTU), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum dan unit pelayanan teknis kesehatan lainnya. Setiap pembangunan unit-unit pelayanan yang ada harus dapat

memenuhi keterjangkauan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pembangunan unit pelayanan berdasarkan katagori diatas harus mempertimbangkan populasi penduduk yang akan dilayani sehingga fungsi unit pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Selain fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga dibangun dan dikembangkan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat antara lain Pondok Bersalin Desa (POLINDES) dan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES).

TABEL 4.98
DATA PRASARANA KESEHATAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Rumah Sakit Umum	-- unit
2	Puskesmas	-- unit
3	Puskesmas pembantu	1 unit
4	Poliklinik/balai pengobatan	-- unit
5	Apotik	-- unit
6	Posyandu	4 unit
7	Toko Obat	-- unit
8	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	-- unit
9	Gudang menyimpan obat	-- unit
10	Jumlah rumah/Kantor Praktek Dokter	-- unit
11	Rumah Bersalin	-- unit
12	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-- unit
13	Rumah Sakit Mata	-- unit

Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan memiliki **Puskesmas Kelurahan Tengah** yang berada tidak jauh dari Kantor Lurah Sagatani yaitu di Jalan Tengah RT.02/RW.01.

TABEL 4.99
DATA SARANA KESEHATAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Dokter Umum	orang

2	Jumlah Dokter Gigi	orang
3	Jumlah Dokter Spesialis lainnya	orang
4	Jumlah Paramedis	orang
5	Jumlah Dukun Bersalin terlatih	orang
6	Bidan	4 orang
7	Perawat	orang
8	Dukun pengobatan alternatif	Orang
9	Jumlah dokter praktek	orang
10	Laboratorium kesehatan	Orang

j. Prasarana dan Sarana Kebersihan

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan Perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk prasarana dan sarana kebersihan di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan terdiri atas :

- Tempat pembuangan sampah (TPS) yang dibangun di pinggir jalan raya;
- Tempat pembuangan sampah yang terbuat dari drum-drum yang berasal dari pengadaan Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang;

Adapun data mengenai prasarana dan sarana kebersihan di wilayah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan secara rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.100
DATA PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PRASARANA DAN SARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	lokasi
2	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	-- lokasi
3	Alat penghancur sampah	Tidak
4	Jumlah gerobak sampah	1 unit
5	Jumlah tong sampah	1 unit
6	Jumlah truck pengangkut sampah	-- unit
7	Jumlah satgas kebersihan	-- kelompok
8	Jumlah anggota satgas kebersihan	-- orang

9	Jumlah pemulung	-- orang
10	Tempat pengelolaan sampah	Ada
11	Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Pemerintah/Swasta/ swadaya
12	Pengelola sampah lainnya	Tidak



BAB V

TINGKAT PERKEMBANGAN KELURAHAN

Tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan perkembangan:

1. PERKEMBANGAN PENDUDUK

TABEL 5.1
DATA PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4
1	Jumlah penduduk tahun ini	975 Orang	954 Orang
2	Jumlah penduduk tahun lalu	975 Orang	954 Orang
3	Persentase perkembangan	0.4 %	0.4 %

TABEL 5.2
DATA PERKEMBANGAN JUMLAH KELUARGA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JUMLAH	KK LAKI-LAKI	KK PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk tahun ini	466 KK	153 KK	619 KK
2	Jumlah penduduk tahun lalu	452 KK	146 KK	598 KK
3	Persentase perkembangan	0.26 %	0.06 %	0.32 %

2. EKONOMI MASYARAKAT

TABEL 5.3
DATA PERKEMBANGAN PENGANGGURAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	KELAS USIA PENDUDUK	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	orang
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	- orang
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	orang

4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	orang
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	- orang
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	- orang
7	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	- orang

TABEL 5.4
DATA PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	TIPE KELUARGA SEJAHTERA	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah keluarga prasejahtera	257 keluarga
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	328 keluarga
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	34 keluarga
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	- keluarga
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	- keluarga
6	Total jumlah kepala keluarga	619 keluarga

3. PRODUK DOMESTIK KELURAHAN BRUTO

TABEL 5.5
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO SUBSEKTOR PERTANIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR PERTANIAN	JUMLAH
1	2	3
	1. TANAMAN PADI DAN PALAWIJA	
1	Luas tanaman padi tahun ini	300 ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.

	2. TANAMAN JAGUNG	
1	Luas tanaman tahun ini	65 ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	3. TANAMAN KADELAI	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	4. TANAMAN BAWANG PUTIH	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	5. TANAMAN BAWANG MERAH	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.

	6. TANAMAN UBI-UBIAN	
1	Luas tanaman tahun ini	5 ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	7. TANAMAN BUAH-BUAHAN	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	8. TANAMAN SAYUR-SAYURAN	
1	Luas tanaman tahun ini	7 ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.

TABEL 5.6
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO SUBSEKTOR PERKEBUNAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR PERKEBUNAN	JUMLAH
1	2	3
	1. KELAPA SAWIT	
1	Luas tanaman tahun ini	1.765 ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	2. KELAPA	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	3. KOPI	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	4. COKLAT	
1	Luas tanaman tahun ini	ha

2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	5. CENGKEH	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	6. TEMBAKAU	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	7. TEH	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.

	8. KEMIRI	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	9. JAMBU METE	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	10. KAPAS	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	11. KARET	
1	Luas tanaman tahun ini	352 ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.

6	Biaya lainnya	Rp.
	12. VANILI	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	13. PALA	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	14. JARAK PAGAR	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.
4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.
	15. JARAK KEPYAR	
1	Luas tanaman tahun ini	ha
2	Nilai produksi tahun ini	Rp.
3	Biaya pemupukan	Rp.

4	Biaya bibit	Rp.
5	Biaya obat	Rp.
6	Biaya lainnya	Rp.

TABEL 5.7
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO SUBSEKTOR PETERNAKAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR PETERNAKAN	JUMLAH
1	2	3
1	Total nilai produksi tahun ini	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Jumlah total ternak tahun ini	ekor

TABEL 5.8
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO SUBSEKTOR PERIKANAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR PERIKANAN	JUMLAH
1	2	3
1	Total nilai produksi tahun ini	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.
5	Total jumlah jenis usaha perikanan	jenis

TABEL 5.9
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Total nilai produksi tahun ini	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.

4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.
5	Total jumlah jenis bahan tambang dan galian yang ada	jenis

TABEL 5.10
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTOSUBSEKTOR KERAJINAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR KERAJINAN	JUMLAH
1	2	3
1	Total nilai produksi	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.
5	Total jumlah jenis kerajinan rumah tangga	jenis

TABEL 5.11
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS SUBSEKTOR	JUMLAH
1	2	3
	1. INDUSTRI PAKAIAN	
1	Total nilai produksi	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.
5	Total jumlah jenis industri yang ada	jenis
	2. INDUSTRI PANGAN	
1	Total nilai produksi	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.

5	Total jumlah jenis industri pangan yang ada	jenis
	3. INDUSTRI PENGOLAHAN MIGAS	
1	Total nilai produksi	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.
5	Total jumlah jenis industri migas	jenis
	4. INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS	
1	Total nilai produksi	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.
5	Total jumlah jenis industri non migas	jenis

TABEL 5.12
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTOSUBSEKTOR KEHUTANAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR KEHUTANAN	JUMLAH
1	2	3
1	Total nilai produksi	Rp.
2	Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp.
3	Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp.
4	Total biaya antara yang dihabiskan	Rp.

TABEL 5.13
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO
SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS SUBSEKTOR	JUMLAH
1	2	3
	1. PERDAGANGAN BESAR	
1	Total nilai transaksi	Rp.
2	Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp.
3	Total jumlah jenis perdagangan besar	jenis
4	Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp.
5	Total biaya antara lainnya	Rp.
	2. PERDAGANGAN ECERAN	
1	Jumlah total jenis perdagangan eceran	jenis
2	Total nilai transaksi	Rp.
3	Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp.
4	Total nilai aset perdagangan eceran	Rp.
	3. HOTEL	
1	Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	unit
2	Jumlah total pendapatan	Rp.
3	Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp.
4	Total nilai biaya antara yang dikeluarkan	Rp.
5	Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp.
	4. RESTORAN	
1	Jumlah tempat penyediaan konsumsi	unit
2	Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp.
3	Biaya antara lainnya	Rp.
4	Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp.

TABEL 5.14
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTOSEKTOR BANGUNAN/KONSTRUKSI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR BANGUNAN/KONSTRUKSI	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah bangunan yang ada tahun ini	unit
2	Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp.
3	Total nilai bangunan yang ada	Rp.
4	Biaya antara lainnya	Rp.

TABEL 5.15
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO
SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR	JUMLAH
1	2	3
	1. BANK	
1	Jumlah transaksi perbankan	Rp.
2	Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp.
3	Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp.
	2. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	
1	Jumlah lembaga keuangan bukan bank	unit
2	Jumlah kegiatan jasa penumpang lembaga keuangan bukan bank	jenis
3	Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp.
4	Biaya yang dikeluarkan	Rp.
	3. SEWA BANGUNAN	
1	Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	unit
2	Total nilai persewaan yang dicapai	Rp.
3	Biaya yang dikeluarkan	Rp.
4	Biaya lainnya	Rp.

4. JASA PERUSAHAAN		
1	Jumlah perusahaan jasa	jenis
2	Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp.
3	Biaya yang dikeluarkan	Rp.
4	Biaya lainnya	Rp.

TABEL 5.16
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTOSEKTOR JASA-JASA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR	JUMLAH
1	2	3
1. JASA PEMERINTAHAN UMUM		
1	Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	unit
2	Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp.
3	Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp.
2. JASA SWASTA		
1	Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	jenis
2	Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp.
3	Biaya yang dikeluarkan	Rp.
3. JASA HIBURAN DAN REKREASI		
1	Jumlah jenis usaha hiburan dan rekreasi	jenis
2	Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp.
3	Biaya antara yang dikeluarkan	Rp.
4. JASA PERORANGAN DAN RUMAH TANGGA		
1	Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	jenis
2	Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp.
3	Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp.
4	Biaya antara yang dikeluarkan	Rp.

TABEL 5.17
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTOSEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR	JUMLAH
1	2	3
	1. ANGKUTAN	
1	Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara dan sungai/danau/penyeberangan.	jenis
2	Jumlah total kendaraan angkutan	unit
3	Nilai total transaksi pengangkutan	Rp.
4	Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp.
	2. JASA PENUNJANG ANGKUTAN	
1	Jumlah jenis kegiatan jasa pelabuhan, terminal, tambatan, agensi, ekspedisi, tol, bongkar muat dan parkir	jenis
2	Jumlah total nilai transaksi jasa penunjang angkutan	Rp.
3	Nilai biaya antara yang dikeluarkan	Rp.
	3. KOMUNIKASI	
1	Jumlah jenis kegiatan informasi dan telekomunikasi serta jasa penunjang lainnya	jenis
2	Jumlah nilai aset telekomunikasi dan informasi yang ada	Rp.
3	Nilai transaksi informasi dan telekomunikasi yang dicapai	Rp.
4	Biaya antara yang dikeluarkan	Rp.

TABEL 5.18
DATA PRODUK DOMESTIK BRUTO
SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SUBSEKTOR	JUMLAH
1	2	3
	1. LISTRIK	
1	Jumlah jenis kegiatan pembangkit dan penyaluran tenaga listrik	jenis

2	Jumlah nilai produksi listrik	Rp.
3	Jumlah total nilai transaksi	Rp.
4	Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp.
	2. GAS	
1	Jumlah kegiatan penyediaan gas	jenis
2	Nilai aset produksi gas	Rp.
3	Nilai transaksi	Rp.
4	Biaya antara yang dikeluarkan	Rp.
	3. AIR MINUM	
1	Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	jenis
2	Nilai aset penyediaan air minum	Rp.
3	Nilai produksi air minum	Rp.
4	Nilai transaksi air minum	Rp.
5	Biaya antara yang dikeluarkan	Rp.
NILAI TOTAL PENDAPATAN DOMESTIK KELURAHAN BRUTO DARI SEMUA SEKTOR (% total nilai produksi dan transaksi terhadap total biaya yang dikeluarkan dari semua sektor)		Rp.

4. PENDAPATAN PERKAPITA

TABEL 5.19
PENDAPATAN PERKAPITA MENURUT SEKTOR
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SEKTOR	KETERANGAN
1	2	3
	1. PERTANIAN	
1	Jumlah rumah tangga petani	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga petani	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh petani	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh petani	orang

5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian	Rp.
	2. PERKEBUNAN	
1	Jumlah rumah tangga perkebunan	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh perkebunan	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh perkebunan	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor perkebunan untuk setiap rumah tangga perkebunan	Rp.
	3. PETERNAKAN	
1	Jumlah rumah tangga peternakan	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga peternakan	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh peternakan	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan	Rp.
	4. PERIKANAN	
1	Jumlah rumah tangga perikanan	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga perikanan	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh perikanan	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh perikanan	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan	Rp.
	5. KERAJINAN	
1	Jumlah rumah tangga pengrajin	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh pengrajin	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor kerajinan untuk setiap rumah tangga pengrajin	Rp.

	6. PERTAMBANGAN	
1	Jumlah rumah tangga pertambangan	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh pertambangan	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan	Rp.
	7. KEHUTANAN	
1	Jumlah rumah tangga kehutanan	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga kehutanan	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh kehutanan	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh kehutanan	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor kehutanan untuk setiap rumah tangga kehutanan	Rp.
	8. INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN BESAR	
1	Jumlah rumah tangga industri	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga industri	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh industri	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh industri	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor industri untuk setiap rumah tangga industri	Rp.
	9. JASA DAN PERDAGANGAN	
1	Jumlah rumah tangga jasa dan perdagangan	keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga jasa dan perdagangan	orang
3	Jumlah rumah tangga buruh jasa dan perdagangan	keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh jasa dan perdagangan	orang
5	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor jasa dan perdagangan untuk setiap rumah tangga jasa dan perdagangan	Rp.

TABEL 5.20
PENDAPATAN RIIL KELUARGA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PENDAPATAN RIIL	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Kepala Keluarga	619 KK
2	Jumlah Anggota Keluarga	1.929 orang
3	Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp. 2.100.000
4	Jumlah Pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp. 800.000
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN KELUARGA		Rp. ± 1 M
RATA-RATA PENDAPATAN PER ANGGOTA KELUARGA		Rp. ± 800.000

5. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

TABEL 5.21
STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SEKTOR	KETERANGAN
1	2	3
	1. PERTANIAN	
1	Petani	orang
2	Buruh Petani	orang
3	Pemilik usaha pertanian	orang
	2. PERKEBUNAN	
1	Buruh perkebunan	orang
2	Karyawan Perusahaan perkebunan	orang
3	Pemilik usaha perkebunan	orang
	3. PETERNAKAN	
1	Buruh usaha peternakan	orang
2	Pemilik usaha peternakan	orang

	4. PERIKANAN	
1	Nelayan	orang
2	Pemilik usaha perikanan	orang
3	Buruh usaha perikanan	orang
	5. KEHUTANAN	
1	Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	orang
2	Buruh usaha pengolahan hasil hutan	orang
3	Pengumpul hasil hutan	orang
	6. PERTAMBANGAN DAN BAHAN GALIAN C	
1	Penambang galian C kerakyatan/perorangan	orang
2	Pemilik usaha pertambangan skala kecil dan besar	orang
3	Buruh usaha pertambangan	orang
	7. INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN RUMAH TANGGA	
1	Montir	orang
2	Tukang batu	orang
3	Tukang kayu	orang
4	Tukang sumur	orang
5	Pemulung	orang
6	Tukang jahit	orang
7	Tukang kue	orang
8	Tukang anyaman	orang
9	Tukang rias	orang
10	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	orang
	8. INDUSTRI MENENGAH DAN BESAR	
1	Karyawan perusahaan swasta	orang
2	Karyawan perusahaan pemerintah	orang

3	Pemilik perusahaan	orang
	9. PERDAGANGAN	
1	Pengusaha perdagangan hasil bumi	orang
2	Buruh jasa perdagangan hasil bumi	orang
	10.JASA	
1	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	orang
2	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	orang
3	Pemilik usaha jasa informasi dan komunikasi	orang
4	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	orang
5	Kontraktor	orang
6	Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	orang
7	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	orang
8	Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	orang
9	Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	orang
10	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	orang
11	Pegawai Negeri Sipil	orang
12	TNI	orang
13	POLRI	orang
14	Dokter swasta	orang
15	Bidan swasta	orang
16	Perawat swasta	orang
17	Dukun/paranormal/supranatural	orang
18	Jasa pengobatan alternatif	orang
19	Dosen swasta	orang
20	Guru swasta	orang
21	Pensiunan TNI/POLRI	orang
22	Pensiunan PNS	orang
23	Pensiunan swasta	orang

24	Pengacara	orang
25	Notaris	orang
26	Jasa konsultasi manajemen dan teknis	orang
27	Seniman/artis	orang
28	Pembantu rumah tangga	orang
29	Sopir	orang
30	Buruh migran perempuan	orang
31	Buruh migran laki-laki	orang
32	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	orang
33	Wiraswasta lainnya	orang
34	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	orang
35	Jasa penyewaan peralatan pesta	orang

6. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

TABEL 5.22
PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS ASET YANG DIKUASI	JUMLAH
1	2	3
	1. TANAH	
1	Tidak memiliki tanah	orang
2	Memilik tanah antara 0,1 – 0,2 ha	orang
3	Memilik tanah antara 0,21 – 0,3 ha	orang
4	Memilik tanah antara 0,31 – 0,3 ha	orang
5	Memilik tanah antara 0,41 – 0,3 ha	orang
6	Memilik tanah antara 0,51 – 0,3 ha	orang
7	Memilik tanah antara 0,61 – 0,3 ha	orang
8	Memilik tanah antara 0,71 – 0,3 ha	orang
9	Memilik tanah antara 0,81 – 0,3 ha	orang
10	Memilik tanah antara 0,91 – 1,0 ha	orang
11	Memilik tanah antara 1,0 – 5,0 ha	orang

12	Memilik tanah antara 5,0 – 10 ha	orang
13	Memilik tanah lebih dari 10 ha	orang
14	Jumlah total penduduk	orang
	2. SARANA TRANSPORTASI UMUM	
1	Memiliki ojek	org unit
2	Memiliki becak	org unit
3	Memiliki cidemo/andong/dokar	org unit
4	Memiliki kapal motor	org unit
5	Memiliki bus	org unit
6	Memiliki mini bus	org unit
7	Memiliki helikopter dan atau pesawat	org unit
	3. SARANA PRODUKSI	
1	Memiliki penggiling padi	orang
2	Memiliki traktor	orang
3	Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	orang
4	Memiliki kapal penangkap ikan	orang
5	Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	orang
6	Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	orang
7	Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	orang
8	Memiliki alat pengolahan hasil hutan	orang
9	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	orang
10	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	orang
11	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	orang
12	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	orang
13	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri migas	orang
	4. PERUMAHAN MENURUT DINDING	
1	Tembok	rumah

2	Kayu	rumah
3	Bambu	rumah
4	Tanah liat	rumah
5	Pelapah pisang/lontar/gebang	rumah
6	Dedaunan	rumah
	5. PERUMAHAN MENURUT LANTAI	
1	Keramik	263 rumah
2	Semen	528 rumah
3	Kayu	25 rumah
4	Tanah	rumah
	6. PERUMAHAN MENURUT ATAP	
1	Genteng	83 rumah
2	Seng	712 rumah
3	Asbes	rumah
4	Beton	rumah
5	Bambu	rumah
6	Kayu	rumah
7	Daun lontar/gebang/enau	rumah
8	Daun ilalang	rumah

7. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

TABEL 5.23
PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS ASET YANG DIKUASI	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	791 keluarga
2	Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	553 keluarga
3	Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya	12 keluarga

4	Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor	keluarga
5	Jumlah keluarga memiliki kapal barang	keluarga
6	Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang	keluarga
7	Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar	keluarga
8	Jumlah keluarga memiliki helikopter	keluarga
9	Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang	keluarga
10	Jumlah keluarga memiliki ternak besar	keluarga
11	Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	keluarga
12	Jumlah keluarga memiliki hiasan emas/berlian	keluarga
13	Jumlah keluarga memiliki buku tabungan bank	keluarga
14	Jumlah keluarga memiliki buku surat berharga	keluarga
15	Jumlah keluarga memiliki sertifikat deposito	keluarga
16	Jumlah keluarga memiliki sertifikat tanah	keluarga
17	Jumlah keluarga memiliki sertifikat bangunan	keluarga
18	Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri besar	keluarga
19	Jumlah keluarga memiliki perusahaan menengah	keluarga
20	Jumlah keluarga memiliki industri kecil	keluarga
21	Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan	keluarga
22	Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan	keluarga
23	Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan	keluarga
24	Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar swalayan	keluarga
25	Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional	keluarga
26	Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa	keluarga
27	Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan	keluarga
28	Jumlah keluarga memiliki aset telekomunikasi	keluarga
29	Jumlah keluarga memiliki saham di perusahaan	keluarga
JUMLAH KELUARGA SELURUHNYA		keluarga

8. PENDIDIKAN MASYARAKAT

TABEL 5.24
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	orang
2	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	249 orang
3	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	orang
4	Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	95 orang
5	Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	219 orang
6	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	orang
7	Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	212 orang
8	Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	orang
9	Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	621 orang
10	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	orang
11	Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat	orang
12	Jumlah penduduk sedang D-1	orang
13	Jumlah penduduk tamat D-1	orang
14	Jumlah penduduk sedang D-2	orang
15	Jumlah penduduk tamat D-2	10 orang
16	Jumlah penduduk sedang D-3	orang
17	Jumlah penduduk tamat D-3	55 orang
18	Jumlah penduduk sedang S-1	orang
19	Jumlah penduduk tamat S-1	142 orang
20	Jumlah penduduk sedang S-2	orang
21	Jumlah penduduk tamat S-2	6 orang
22	Jumlah penduduk tamat S-3	orang
23	Jumlah penduduk sedang SLB A	orang
24	Jumlah penduduk tamat SLB A	orang
25	Jumlah penduduk sedang SLB B	orang

26	Jumlah penduduk tamat SLB B	orang
27	Jumlah penduduk sedang SLB C	orang
28	Jumlah penduduk tamat SLB C	orang
29	Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	orang
30	% penduduk buta huruf [(1) : jumlah penduduk] x 100%	%
31	% penduduk tamat SLTP/ sederajat [(3) : jumlah penduduk] x 100%	%

TABEL 5.25
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	KONDISI MASYARAKAT	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	orang
2	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	orang
3	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	orang

TABEL 5.26
RASIO GURU DAN MURID
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	KONDISI MASYARAKAT	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah guru TK dan Kelompok bermain anak	orang
2	Jumlah siswa TK dan Kelompok bermain anak	orang
3	Jumlah guru SD dan sederajat	orang
4	Jumlah siswa SD dan sederajat	orang
5	Jumlah guru SLTP dan sederajat	orang
6	Jumlah siswa SLTP dan sederajat	orang
7	Jumlah guru SLTA dan sederajat	orang
8	Jumlah siswa SLTA dan sederajat	orang
9	Jumlah siswa SLB	orang
10	Jumlah guru SLB	orang

TABEL 5.27
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah perpustakaan kelurahan	1 unit
2	Jumlah taman bacaan kelurahan	unit
3	Jumlah perpustakaan keliling	unit
4	Jumlah sanggar belajar	unit
5	Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	kegiatan
6	Jumlah kelompok belajar paket A	kelompok
7	Jumlah peserta ujian paket A	orang
8	Jumlah kelompok belajar paket B	kelompok
9	Jumlah peserta ujian paket B	orang
10	Jumlah kelompok belajar paket C	kelompok
11	Jumlah peserta ujian paket C	orang
12	Jumlah lembaga kursus keterampilan	unit
13	Jumlah peserta kursus keterampilan	orang

9. KESEHATAN MASYARAKAT

TABEL 5.28
KUALITAS IBU HAMIL
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	IBU HAMIL	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah ibu hamil	35 orang
2	Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	35 orang
3	Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	35 orang
4	Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	- orang
5	Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	- orang
6	Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	- orang
7	Jumlah kematian ibu hamil	- orang

8	Jumlah ibu nifas	35	orang
9	Jumlah kematian ibu nifas	-	orang
10	Jumlah ibu nifas hidup	35	orang

TABEL 5.29
KUALITAS BAYI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	BAYI	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah keguguran kandungan	- orang
2	Jumlah bayi lahir	35 orang
3	Jumlah bayi lahir mati	- orang
4	Jumlah bayi lahir hidup	35 orang
5	Jumlah bayi mati usia 0-1 bulan	- orang
6	Jumlah bayi mati usia 1-12 bulan	- orang
7	Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	3 orang
8	Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	- orang

TABEL 5.30
KUALITAS PERSALINAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PERSALINAN	JUMLAH
1	2	3
	1. TEMPAT PERSALINAN	
1	Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	18 unit
2	Tempat persalinan Rumah Bersalin	8 unit
3	Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
4	Tempat persalinan Polindes	0 unit
5	Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	7 unit
6	Tempat persalinan rumah praktek bidan	2 unit
7	Tempat praktek dokter	0 unit
8	Rumah dukun	0 unit

9	Rumah sendiri	-	unit
	2. PERTOLONGAN PERSALINAN		
1	Jumlah persalinan ditolong Dokter	12	tindakan
2	Jumlah persalinan ditolong Bidan	23	tindakan
3	Jumlah persalinan ditolong perawat	0	tindakan
4	Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0	tindakan
5	Jumlah persalinan ditolong keluarga	0	tindakan

TABEL 5.31
CAKUPAN IMUNISASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	CAKUPAN IMUNISASI	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah bayi usia 2 bulan	35 orang
2	Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio-1	35 orang
3	Jumlah bayi usia 3 bulan	35 orang
4	Jumlah bayi 3 bulan yang Imunisasi DPT-2 dan Polio-2	35 orang
5	Jumlah bayi usia 4 bulan	35 orang
6	Jumlah bayi 4 bulan yang Imunisasi DPT-3 dan Polio-3	35 orang
7	Jumlah bayi 9 bulan	28 orang
8	Jumlah bayi 9 bulan yang Imunisasi campak	28 orang
9	Jumlah bayi yang sudah Imunisasi cacar	0 orang

TABEL 5.32
PERKEMBANGAN PASANGAN USIA SUBUR DAN KB
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PUS DAN KB	JUMLAH
1	2	3
	1. PASANGAN USIA SUBUR (PUS)	
1	Jumlah remaja putri usia 12-17 tahun	106 orang
2	Jumlah perempuan usia subur 15-49 tahun	276 orang

3	Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	2	orang
4	Jumlah pasangan usia subur	276	pasangan
	2. KELUARGA BERENCANA		
1	Jumlah akseptor KB	56	orang
2	Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	13	orang
3	Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	6	orang
4	Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	5	orang
5	Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	20	orang
6	Jumlah pengguna metode vasektomi	0	orang
7	Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubertomi	2	orang
8	Jumlah pengguna metode KB Kalender/KB Alamiah	10	orang
9	Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0	orang
10	Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode	56	orang
11	Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	169	orang

TABEL 5.33
WABAH PENYAKIT
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS WABAH PENYAKIT	JUMLAH
1	2	3
	1. MUNTABER	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
2	Jumlah yang meninggal	0 orang
	2. DEMAM BERDARAH	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
2	Jumlah yang meninggal	0 orang
	3. KOLERA	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian

2	Jumlah yang meninggal	0 orang
	4. POLIO	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
2	Jumlah yang meninggal	orang
	5. CIKUNGUNYA	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
2	Jumlah yang meninggal	orang
	6. FLU BURUNG	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
2	Jumlah yang meninggal	orang
	7. BUSUNG LAPAR	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
2	Jumlah yang meninggal	orang
	8. KELAPARAN	
1	Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
2	Jumlah yang meninggal	orang

TABEL 5.34
ANGKA HARAPAN HIDUP
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	ANGKA HARAPAN HIDUP	JUMLAH
1	2	3
1	Angka harapan hidup penduduk Kelurahan	tahun
2	Angka harapan hidup penduduk Kota	tahun
3	Angka harapan hidup Provinsi	tahun
4	Angka harapan hidup Nasional	tahun

TABEL 5.35
CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	PENGUNAAN SUMBER AIR	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	keluarga
2	Jumlah keluarga pelanggan PAM	keluarga
3	Jumlah keluarga menggunakan penampung air hujan	keluarga
4	Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	keluarga
5	Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	keluarga
6	Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	keluarga
7	Jumlah keluarga menggunakan air sungai	keluarga
8	Jumlah keluarga menggunakan embung	keluarga
9	Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	keluarga
10	Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	keluarga
11	Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber diatas	keluarga
TOTAL JUMLAH KELUARGA		keluarga

TABEL 5.36
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	INDIKATOR PHBS	JUMLAH
1	2	3
	1. KEBIASAN BUANG AIR BESAR	
1	Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	keluarga
2	Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	keluarga
3	Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	keluarga
4	Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	keluarga
	2. POLA MAKAN	
1	Kebiasaan penduduk makan dalam sehari 1 x	Ada / Tidak

2	Kebiasaan penduduk makan sehari 2 x	Ada / Tidak
3	Kebiasaan penduduk makan sehari 3 x	Ada / Tidak
4	Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3x	Ada / Tidak
5	Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 x	Ada / Tidak
	3. KEBIASAAN BEROBAT BILA SAKIT	
1	Dukun Terlatih	Tak Ada / Sedikit / Banyak
2	Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Tak Ada / Sedikit / Banyak
3	Obat tradisional dari dukum pengobatan alternatif	Tak Ada / Sedikit / Banyak
4	Paranormal	Tak Ada / Sedikit / Banyak
5	Obat tradisional dari keluarga sendiri	Tak Ada / Sedikit / Banyak
6	Tidak diobati	Tak Ada / Sedikit / Banyak

TABEL 5.37
JUMLAH PENDERITA SAKIT TAHUN INI (2011)
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH PENDERITA	DIRAWAT DI
1	2	3	4
1	Jantung	orang	Rumah/RS/Puskemas
2	Lever	orang	Rumah/RS/Puskemas
3	Paru-paru	orang	Rumah/RS/Puskemas
4	Kanker	orang	Rumah/RS/Puskemas
5	Stroke	orang	Rumah/RS/Puskemas
6	Diabetes Melitus	orang	Rumah/RS/Puskemas
7	Ginjal	orang	Rumah/RS/Puskemas
8	Malaria	orang	Rumah/RS/Puskemas
9	Lepra/Kusta	orang	Rumah/RS/Puskemas
10	HIV/AIDS	orang	Rumah/RS/Puskemas
11	Gila/Stress	orang	Rumah/RS/Puskemas
12	TBC	orang	Rumah/RS/Puskemas
13	ISPA	orang	Rumah/RS/Puskemas
14	Asma	orang	Rumah/RS/Puskemas

TABEL 5.38
PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah MCK Umum	unit
2	Jumlah Posyandu	unit
3	Jumlah Kader Posyandu Aktif	orang
4	Jumlah Pembina Posyandu	orang
5	Jumlah Dasawisma	dasawisma
6	Jumlah Pengurus Dasawisma Aktif	orang
7	Jumlah Kader Bina Keluarga Balita Aktif	orang
8	Jumlah Petugas lapangan Keluarga Berencana Aktif	Diisi / Tidak
9	Buku rencana kegiatan posyandu	Diisi / Tidak
10	Buku data pengunjung posyandu	Diisi / Tidak
11	Buku kegiatan pelayanan posyandu	jenis
12	Buku administrasi posyandu lainnya	jenis
13	Jumlah kegiatan posyandu	jenis
14	Jumlah kader kesehatan lainnya	orang
15	Jumlah kegiatan pengobatan gratis	jenis
16	Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	jenis
17	Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	jenis

10. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

TABEL 5.39
TINGKAT KASUS KONFLIK SARA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Kasus konflik pada tahun ini	kasus
2	Kasus konflik SARA pada tahun ini	kasus
3	Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	kasus

4	Jumlah kasus pertengkar dan atau perkelahian antar RT/RW	kasus
5	Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	kasus
6	Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam kelurahan dengan kelompok masyarakat dari kelurahan lain	kasus
7	Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	kasus
8	jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	Rp.
9	Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	orang
10	Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	kasus
11	Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	orang
12	Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	Rp.
13	Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	kasus
14	Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	orang
15	Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp.
16	Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik SARA	unit
17	Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik SARA	rumah
18	Jumlah korban luka akibat konflik SARA	orang
19	Jumlah korban meninggal akibat konflik SARA	orang
20	Jumlah janda akibat konflik SARA	orang
21	Jumlah anak yatim akibat konflik SARA	orang
22	Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang

TABEL 5.40
TINGKAT KASUS PERKELAHIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	kasus
2	Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	kasus
3	Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	kasus

4	Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	kasus
5	Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang

TABEL 5.41
TINGKAT KASUS PENCURIAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Kasus pencurian/perampokan yang terjadi pada tahun ini	kasus
2	Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk kelurahan setempat	kasus
3	Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk kelurahan setempat	kasus
4	Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	kasus
5	Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	orang

TABEL 5.42
TINGKAT KASUS PENJARAHAN DAN PENYEROBOTAN TANAH
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	kasus
2	Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	kasus
3	Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	kasus
4	Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	orang

TABEL 5.43
TINGKAT KASUS PERJUDIAN, PENIPUAN DAN PENGELAPAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	orang
2	Jenis perjudian yang ada di kelurahan ini	kasus
3	Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	kasus
4	Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	kasus

TABEL 5.44
TINGKAT KASUS PEMAKAIAN MIRAS DAN NARKOBA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah warung/toko yang menyediakan miras	warung
2	Jumlah penduduk yang mengkonsumsi miras	orang
3	Jumlah kasus mabuk akibat miras	kasus
4	Jumlah pengedar narkoba	orang
5	Jumlah penduduk yang mengkonsumsi narkoba	orang
6	Jumlah kasus mabuk/teler akibat narkoba	kasus
7	Jumlah kasus kematian akibat narkoba	kasus
8	Jumlah pelaku miras yang diadili atau diproses secara hukum	orang
9	Jumlah pelaku narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	orang

TABEL 5.45
TINGKAT KASUS PROSTITUSI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	orang
2	Lokalisasi prostitusi	Ada / Tidak
3	Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	buah
4	Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	kasus
5	Jumlah pembinaan pelaku prostitusi Kali/.....
6	Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi Kali/.....

TABEL 5.46
TINGKAT KASUS PEMBUNUHAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	kasus
2	Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk kelurahan setempat	kasus
3	Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	kasus
4	Jumlah kasus bunuh diri	kasus
5	Jumlah kasus yang diproses secara hukum	kasus

TABEL 5.47
TINGKAT KASUS PENCULIKAN
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah kasus penculikan	kasus
2	Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk kelurahan setempat	kasus
3	Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk	kasus

	setempat	
4	Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	kasus

TABEL 5.48
TINGKAT KASUS KEJAHATAN SEKSUAL
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	kasus
2	Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	kasus
3	Jumlah kasus kehamilan diluar nikah menurut hukum negara	kasus
4	Jumlah kasus kehamilan diluar nikah menurut hukum adat	kasus
5	Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	unit

TABEL 5.49
TINGKAT KASUS MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah gelandangan	orang
2	Jumlah pengemis	orang
3	Jumlah anak jalanan dan terlantar	orang
4	Jumlah manusia lanjut usia terlantar	orang
5	Jumlah orang gila/stress/cacat mental	orang
6	Jumlah orang cacat fisik	orang
7	Jumlah orang kelaian kulit	orang
8	Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	orang
9	Jumlah rumah dan kawasan kumuh	unit
10	Jumlah panti jompo	unit
11	Jumlah panti asuhan	unit

12	Jumlah rumah singgah anak jalanan	unit
13	Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	orang
14	Jumlah penghuni bantaran sungai	orang
15	Jumlah penghuni penggiran rel kereta api	orang
16	Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum	orang
17	Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	orang
18	Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun	orang
19	Jumlah anak piatu usia 0-18 tahun	orang
20	Jumlah anak yatim piatu usia 0-18 tahun	orang
21	Jumlah janda	orang
22	Jumlah duda	orang
23	Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	orang
24	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	orang
25	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	orang
26	Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	orang
27	Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	orang
28	Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	orang
29	Jumlah penduduk eks NAPI	orang
30	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	orang
31	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	orang
32	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	orang
33	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	orang
34	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	orang
35	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekeringan	orang
36	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	orang
37	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	orang
38	Jumlah penduduk rawan kelaparan	orang
39	Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	orang

40	Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	orang
41	Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	orang
42	Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	orang
43	Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	orang

TABEL 5.50
TINGKAT KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	kasus
2	Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	kasus
3	Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	kasus
4	Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	kasus
5	Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	kasus

TABEL 5.51
TINGKAT KASUS TEROR DAN INTIMIDASI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam kelurahan	kasus
2	Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar kelurahan	kasus
3	Jumlah kasus selebaran dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan warga	kasus
4	Jumlah kasus terorisme yang terjadi di kelurahan tahun ini	kasus
5	Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	kasus
6	Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	kasus

TABEL 5.52
TINGKAT KASUS PELEMBAGAAN
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN SEMESTA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	2	3
1	Organisasi siskamling	Ada / Tidak
2	Organisasi pertanahan sipil dan perlindungan masyarakat	Ada / Tidak
3	Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada siskamling/pos ronda	RT
4	Jumlah anggota Hansip dan Linmas	orang
5	Jadwal kegiatan siskamling dan pos ronda	Ada / Tidak
6	Buku anggota Hansip dan Linmas	jenis
7	Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	unit
8	Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Lurah	kegiatan
9	Jumlah pos jaga induk kelurahan	Pos

11. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

TABEL 5.53
TINGKAT KESADARAN BERPEMERINTAHAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KESADARAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jenis kegiatan pemantapan nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara	1 jenis
2	Jumlah kegiatan pemantapan nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara	1 kegiatan
3	Jenis kegiatan pemantapan nilai Bhineka Tunggal Ika	1 jenis
4	Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhineka Tunggal Ika	1 kegiatan
5	Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	1 jenis
6	Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	kegiatan
7	Jumlah kasus warga kelurahan yang minta suaka/lari dari luar negeri	kasus
8	Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara resmi	- orang
9	Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga	- orang

	secara tidak resmi	
10	Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari kelurahan	- kasus
11	Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di kelurahan perbatasan negara tetangga	- kasus
12	Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di kelurahan tahun ini	- kasus
13	Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	- kasus
14	Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	- kasus
15	Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di kelurahan perbatasan antar negara	- kasus
16	Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi di kelurahan ini	- kasus
17	Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan kelurahan antar provinsi	- kasus
18	Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	- kasus
19	Jumlah kasus yang mengarahkan kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran BKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Lurah	- kasus
20	Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan kelurahan	- kasus
21	Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/pekebun/perambah hutan asal kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	- kasus

TABEL 5.54
TINGKAT KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KESADARAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas kelurahan	1 jenis
2	Jumlah wajib pajak	388 orang
3	Target PBB	Rp. 44.547.629

4	Realisasi PBB	%
5	Jumlah tindakan terhadap penunggak PBB	tindakan
6	Jenis retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan kelurahan	1 jenis
7	Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan kelurahan	388 orang
8	Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan kelurahan	Rp.44.547.629
9	Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan kelurahan	%
10	Jenis pungutan resmi lainnya di kelurahan	jenis
11	Target pungutan resmi tingkat kelurahan	Rp.
12	Realisasi pungutan resmi di kelurahan	%
13	Jumlah kasus pungutan liar	kasus
14	Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	kasus

TABEL 5.55
TINGKAT KESADARAN PARTISIPASI POLITIK
KELURAHAN TENGAH KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	JENIS KESADARAN	JUMLAH
1	2	3
	1. JUMLAH PARTAI POLITIK DAN PEMILU	
1	Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	orang
2	Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif	orang
3	Jumlah perempuan dari penduduk kelurahan ini yang aktif di partai politik	orang
4	Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di kelurahan ini	partai
5	Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah kelurahan ini	partai
6	Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari kelurahan	orang
7	Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	orang
8	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	orang
	2. PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
1	Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	

2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Walikota lalu	
3	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	
	3. PENENTUAN KEPALA DESA/LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN	
1	Penentuan Jabatan Kepala Desa	1. Dipilih masyarakat secara langsung
		2. Dipilih oleh perwakilan
		3. Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas
		4. Diangkat turun temurun oleh masyarakat
2	Penentuan Sekretaris Desa	1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Walikota
		2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota
		3. Diusulkan oleh Kepala Desa, dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Walikota
3	Penentuan perangkat desa termasuk Kepala Dusun	1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat
		2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
		3. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat
4	Masa jabatan Kepala Desa	tahun
5	Penentuan jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	1. Ditunjuk dan diangkat oleh Camat sesuai delegasi kewenangan dari Walikota
		2. Ditunjuk dan diangkat oleh Walikota secara langsung
	4. PEMILIHAN BPD	
1	Jumlah anggota BPD	orang
2	Penentuan anggota BPD	1. Dipilih masyarakat secara langsung
		2. Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat
		3. Ditunjuk oleh Kepala Desa/Camat dan unsur lainnya
		4. Disahkan melalui keputusan Walikota
3	Pimpinan BPD	1. Dipilih dari dan oleh anggota BPD
		2. Dipilih oleh Kepala Desa dan disetujui Camat

		3. Ditunjuk Camat
		4. Dipilih oleh rakyat secara langsung dari para anggota BPD
4	Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	Ada / Tidak
5	Anggaran untuk BPD	Ada / Tidak
6	Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa
		2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali
		3. Rancangan Peraturan Desa buah
		4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali
		5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali
		6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali
		7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali
	5. PEMILIHAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
1	Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan kelurahan	Ada / Tidak
2	Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	1. Perdes
		2. Keputusan Kepala Desa
		3. Keputusan Camat
		4. Belum diatur
3	Jumlah organisasi anggota kemasyarakatan	unit organisasi
4	Dasar hukum pembentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	1. Keputusan Lurah
		2. Keputusan Camat
		3. Belum diatur
5	Jumlah organisasi anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	unit organisasi
6	Pemilihan pengurus LKK	1. Dipilih oleh rakyat secara langsung
		2. Ditunjuk dan diangkat oleh Lurah
		3. Ditunjuk dan diangkat oleh Camat
7	Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan organisasi anggota LKD/LKK	1. Dipilih oleh rakyat secara langsung
		2. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah

